

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL

(Studi Pada Pasar Sukodono dan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

CHOIRUL ANAM
NIM. 125030107111097



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	13
B. Administrasi Pembangunan.....	14
1. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	14
2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan.....	15
C. Pemerintahan Daerah	16
1. Pengertian Pemerintahan Daerah (Local Government).....	16
2. Peran Pemerintah Daerah	17
D. Pasar	19
1. Pengertian Pasar	19
2. Jenis-jenis Pasar	19
a. Pasar Tradisional	19
b. Pasar Modern.....	21
3. Fungsi Pasar	21
E. Revitalisasi	23
1. Pengertian Revitalisasi	23
2. Konsep Pengelolaan dan Revitalisasi Pasar Tradisional.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	33
C. Lokasi dan Situs Penelitian	34
D. Sumber Data dan Jenis Data.....	35

E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Instrumen Penelitian	38
G. Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

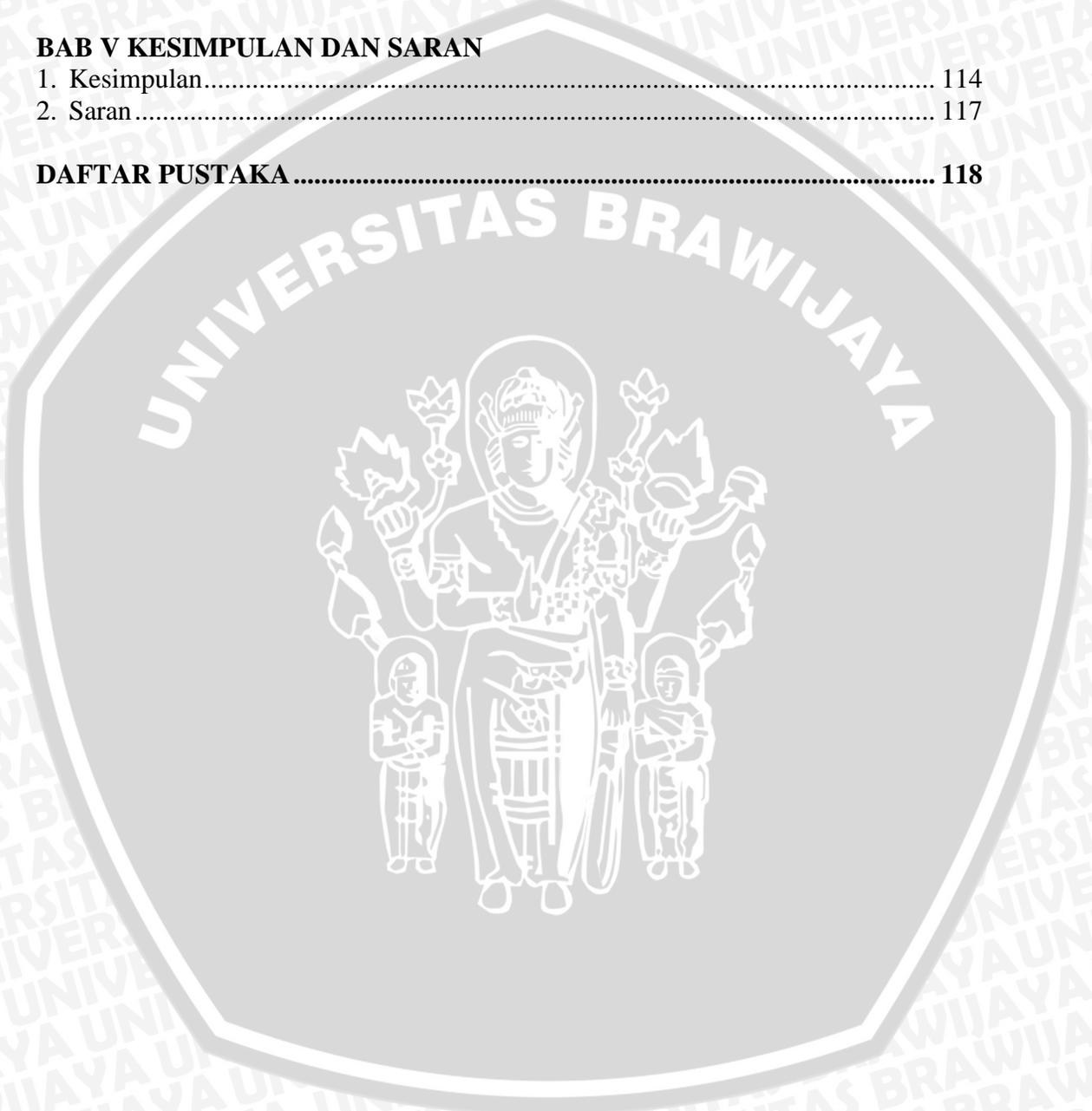
A. Gambaran Umum	43
1. Kabupaten Lumajang	43
a. Kondisi Geografi	43
b. Kondisi Demografis	44
c. Lambang, Visi, dan Misi	46
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
a. Gambaran Umum Dinas Pasar	50
b. Visi dan Misi Dinas Pasar	62
c. Gambaran Umum Pasar Sukodono	65
1) Sejarah Pasar Sukodono	65
2) Aparat Pasar Sukodono	66
3) Inventaris Pasar Sukodono	67
B. Penyajian Data	68
1. Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang	68
a. Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan Pasar	68
b. Aspek Finansial	75
c. Aspek Distribusi dan Kontrol Kualitas Barang	78
d. Aspek Perbaikan Sarana Fisik dan Infrastruktur	81
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang	87
a. Faktor Pendukung	87
1) Sumber Daya Anggaran	88
2) Lokasi	89
b. Faktor Penghambat	89
1) Sumber Daya Manusia	91
2) Pihak Ketiga atau Kontraktor	92
3) Kebijakan	94
4) Proses Lelang	95
C. Pembahasan	95
1. Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang	95
a. Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan Pasar	95
b. Aspek Finansial	99
c. Aspek Distribusi dan Kontrol Kualitas Barang	101
d. Aspek Perbaikan Sarana Fisik dan Infrastruktur	104
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang	106
a. Faktor Pendukung	107
1) Sumber Daya Anggaran	107

2) Lokasi.....	108
b. Faktor Penghambat.....	109
1) Sumber Daya Manusia.....	109
2) Pihak Ketiga atau Kontraktor.....	111
3) Kebijakan.....	112

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

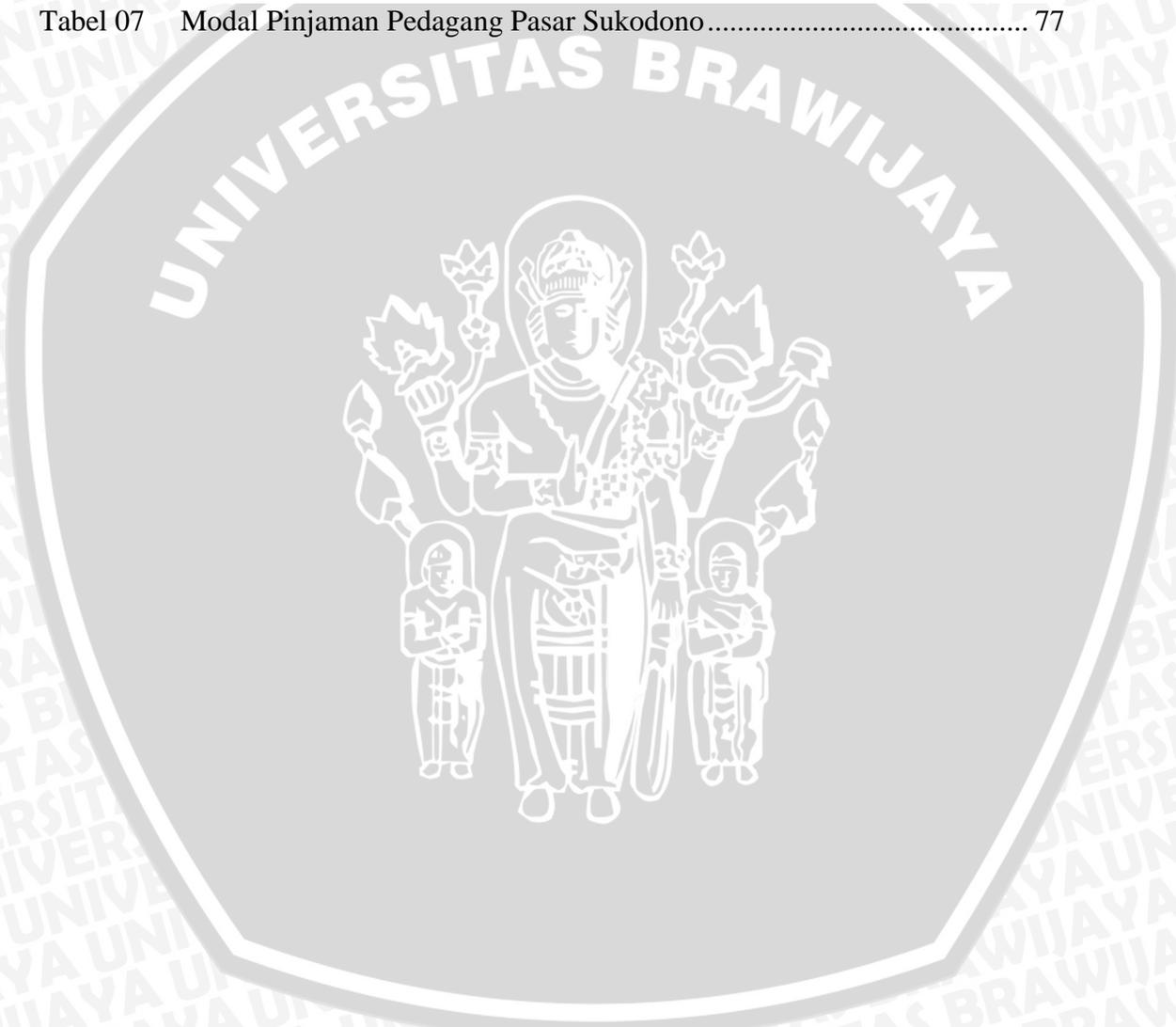
1. Kesimpulan.....	114
2. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA.....	118
----------------------------	------------



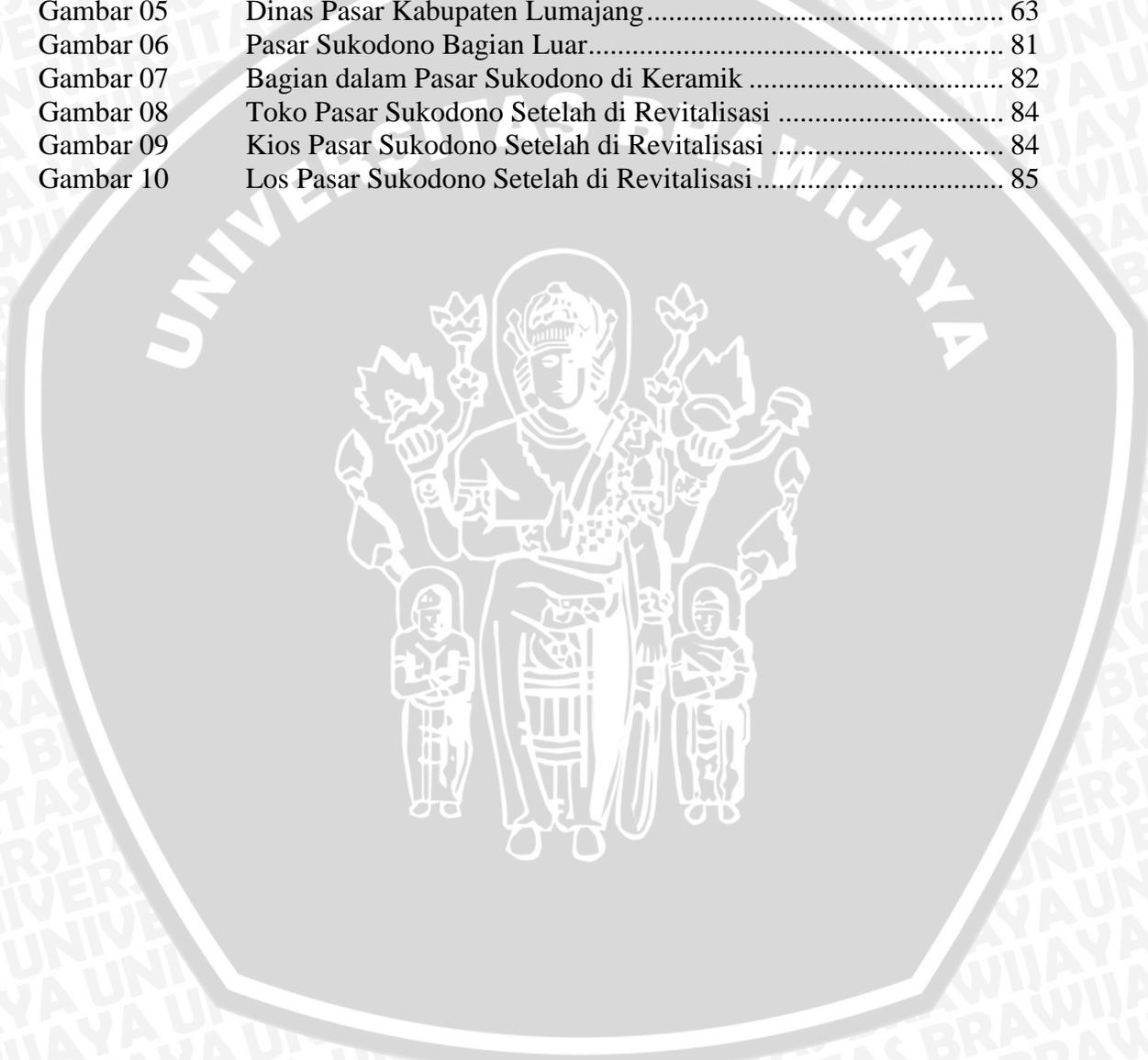
DAFTAR TABEL

Tabel 01	Tahun Revitalisasi Pasar Tradisional di Kabupaten Lumajang	6
Tabel 02	Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang.....	44
Tabel 03	Jumlah Pegawai di Pasar Sukodono.....	65
Tabel 04	Daftar Inventaris Barang.....	66
Tabel 05	Jumlah Pedagang dan Lokasi Berdagang.....	67
Tabel 06	Tim Survei Revitalisasi Pasar Sukodono	72
Tabel 07	Modal Pinjaman Pedagang Pasar Sukodono.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 01	Peta Kabupaten Lumajang	43
Gambar 02	Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang Menurut Jenis Kelamin, Kepadatan dan Rasio Seks Tahun 2013	44
Gambar 03	Lambang Daerah Kabupaten Lumajang	45
Gambar 04	Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.....	52
Gambar 05	Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.....	63
Gambar 06	Pasar Sukodono Bagian Luar.....	81
Gambar 07	Bagian dalam Pasar Sukodono di Keramik	82
Gambar 08	Toko Pasar Sukodono Setelah di Revitalisasi	84
Gambar 09	Kios Pasar Sukodono Setelah di Revitalisasi	84
Gambar 10	Los Pasar Sukodono Setelah di Revitalisasi	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Rekomendasi Penelitian	121
Lampiran 2	Denah Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang	122
Lampiran 3	Lembar Disposisi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang	123
Lampiran 4	Pedoman Wawancara.....	124
Lampiran 5	Curriculum Vitae	126



MOTTO

“Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu”

(Abdurrahman Wahid)



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 07 Desember 2016



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Sukodono dan
Dinas Pasar Kabupaten Lumajang)
Disusun oleh : Choirul Anam
NIM : 125030107111097
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 06 Desember 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS.

NIP. 195407041981031003



Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP

NIP. 198102102005012002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari :Kamis
Tanggal :19 Januari 2017
Jam :10.00 WIB
Skripsi atas nama : Choirul Anam
Judul : Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Sukodono dan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani
NIP. 19540704 198103 1 003

Anggota Komisi Pembimbing



Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP
NIP. 19701126 200212 2 005

Ketua Komisi Penguji



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota Komisi penguji



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

RINGKASAN

Choirul Anam, 2016, **Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Sukodono dan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang)**, Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS dan Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP., Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 126+xvi

Pasar tradisional merupakan salah satu titik tumpu perekonomian masyarakat. Sedangkan pasar tradisional identik dengan kumuh, bau, kotor dan sebagainya. Perlunya strategi pengembangan pasar tradisional agar pasar tradisional tetap menjadi pilihan pembeli untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pengembangan pasar tradisional memang tidak mudah, salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pengembangan pasar tradisional yaitu melalui kebijakan atau program revitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kajian teori yang digunakan adalah konsep revitalisasi pasar tradisional oleh Rizal (2013:5-7). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi pada Pasar Sukodono dan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.

Hasil penelitian pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa: (1) aspek tata kelola dan kelembagaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang; (2) aspek finansial berasal dari APBD; (3) aspek distribusi dan kontrol kualitas barang dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh pegawai Dinas Pasar dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (4) aspek perbaikan sarana fisik berupa perbaikan bangunan pasar dan infrastruktur-infrastruktur yang ada di pasar. Faktor pendukung pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional antara lain: sumber daya anggaran dan lokasi Pasar Sukodono. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional: sumber daya manusia dan pihak ketiga atau kontraktor.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, saran yang diberikan antara lain melakukan tambahan lahan parkir khususnya parkir kendaraan roda empat, membuat program resmi tentang aspek distribusi dan kontrol kualitas barang, memberikan sanksi kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi bulanan sesuai ketentuan.

Kata Kunci: Revitalisasi, Pasar tradisional

SUMMARY

Choirul Anam, 2016, **Revitalization of Traditional Markets (Study On Sukodono Market and Office Market Lumajang)**, Prof. Dr. Andi July Abdul Gani, MS and Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP., Faculty of Administration, University of Brawijaya, 126+ xvi

Traditional market is one of the pedestal point for economy of society. While traditional market identically with seedy, smelly, dirty and etc. The development strategy of traditional markets needed to traditional markets remains an option buyer to shop for their daily needs. It is not easy to develop of traditional markets, one of the solution doing by the Central Government and Local Government for the development of traditional markets pass through a policy or revitalization program. This study aims to determine, describe and analyze the implementation of the revitalization of traditional markets as well as the factors supporting and hindering the implementation of the revitalization on the traditional markets. This research is a descriptive qualitative approach and the study of the theory used is the revitalization of traditional markets concept for Rizal (2013:5-7). Data collection techniques in this study conducted interviews and documentation on Sukodono Market and Office Market Lumajang.

The results of the implementation study to revitalize traditional markets Market Lumajang Sukodono show that: (1) aspect of governance and institutional markets carried out by the Local Government and the Office of Market Lumajang; (2) The financial aspect comes from the budget (APBD) ; (3) aspects of the distribution and quality control of goods is done every 1 month by staff at the Department of Market and Food and Drug Monitoring Agency (BPOM); (4) the physical aspects of the improvement of facilities in the improvement of the market buildings and infrastructures that exist in the market. Supporting factors the implementation of the revitalization on the traditional markets, among others: budgetary resources and Sukodono Market location. While the factors inhibiting the implementation of the revitalization on the traditional markets: human resources and third-part or contractor.

Based on the conclusions of the research conducted, advice given is perform additional parking place in particular for car, making the official program aspects of the distribution and quality control, giving sanction to traders who do not pay a monthly levy accordingly.

Keywords: Revitalization, Traditional Market

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Sukodono dan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang). Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatankali ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga bagi penulis.
7. Jajaran Straf Akademik dan Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu dan melayani penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, Bapak Teguh Widjayono yang telah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
9. Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, Ibu Lilik Kusminiwati, S.Sos, MH yang telah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
10. Kepala Bidang Perijinan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, Bapak Anshori yang telah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
11. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, Bapak Supangat yang telah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
12. Kepala Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang, Bapak Satori yang telah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
13. Mantan Kepala Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang, Bapak Agung Pribadi S.AP yang telah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
14. Kedua orang tua penulis, Ibu tercinta Susianah dan Ayah tercinta Samsul Arif yang tiada henti mendoakan, mendukung, memotivasi dan memberikan kasih sayang hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi.

15. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat di sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, motivasi dan kebersamaan yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini.

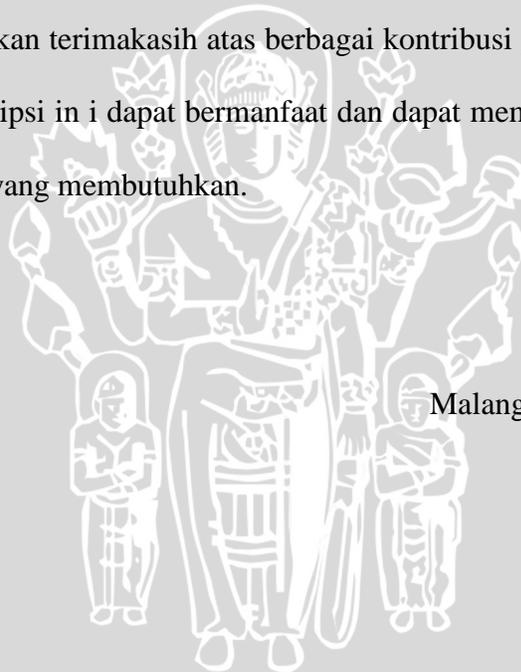
16. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

17. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih atas berbagai kontribusi yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini i dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 06 Desember 2016

Penulis





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkelanjutan dan dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah beserta perangkat birokrasi bekerjasama guna meningkatkan pembangunan nasional. Kerjasama antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini didasari oleh kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan secara merata ditingkat nasional maupun tingkat daerah, baik dikota maupun di desa.

Dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terdapat adanya perubahan yang mendasar pada pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini ditandai dengan adanya otonomi daerah yang memberikan hak dan wewenang tentang perubahan paradigma pembangunan, yaitu dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara adil dan berimbang melalui kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang otonomi untuk mengatur dan mengurus secara luas kecuali urusan pemerintah pusat yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan

sebagai urusan pemerintah pusat. Tujuan pembangunan dalam masyarakat dapat dijabarkan dalam lima komponen (Afiffudin 2011:78) yaitu:

Pertama kemakmuran bidang material ini biasanya oleh rakyat kebanyakan, secara sederhana sering diartikan sebagai keserba cukupan dalam kebutuhan fisik, kedua Kesejahteraan mental sering dikaitkan dengan tersedia kesempatan untuk meningkatkan pendidikan, ketiga ketentraman fisik dan rohania, keempat Pengakuan atas tingginya harkat dan martabat manusia dan perlakuan terhormat sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri, kelima Masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial.

Sebagian besar masyarakat beranggapan pembangunan hanya bersifat fisik serta kasat mata seperti pembangunan gedung bertingkat, masjid, jalan tol dan sebagainya. Hakikatnya pembangunan adalah membangun masyarakat secara menyeluruh disegala bidang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di bidang hukum terjadi perubahan di dalam bidang ketenagakerjaan antara lain dengan membentuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang merupakan lembaga tinggi negara yang berdaulat dan berkedudukan setingkat presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Di bidang politik bisa kita lihat perubahan demokrasi secara perlahan semakin membuka wawasan tentang nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Di bidang ekonomi stabilitas ekonomi terus meningkat sejak memasuki tahun 2002 nilai tukar rupiah dengan kecenderungan menguat, laju inflasi dan suku bunga menurun, serta cadangan devisa meningkat (Afiffudin 2011:78).

Salah satu hasil dari pembangunan nasional di Indonesia adalah berkembangnya ekonomi nasional. Hal tersebut melatar belakangi pertumbuhan industri perdagangan dan pasar berkembang secara pesat. Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan dan pasar menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan beragamnya tempat berbelanja meningkat dan menunjukkan bahwa

semakin tingginya kebutuhan akan tempat usaha bagi masyarakat. Pasar merupakan suatu tempat dimana penjual dan pembeli bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi. Di dalam bahasa sehari-hari pasar pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu lokasi geografis (Sudarman, 1992:7). Pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

Kualitas pasar tradisional yang dimiliki pemerintah daerah belum seimbang jika dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan pasar modern. Hal ini bisa dilihat dari seiring meningkatnya kebutuhan dan semakin banyaknya barang-barang konsumsi yang diinginkan oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat lebih memilih berbelanja dipasar modern dari pada pasar tradisional dengan berbagai alasan, misalnya di pasar modern barangnya lebih higienis, tempatnya lebih bersih, nyaman serta tidak bau seperti di pasar tradisional.

Berdasarkan data yang terhimpun dari Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyebutkan jumlah pasar tradisional di seluruh Indonesia turun drastis dari 13.540 pasar tradisional menjadi 9.950 pasar dalam waktu 4 tahun periode 2007-2011. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh AC Nielson pada tahun 2013 menyebutkan bahwa “Jumlah pasar tradisional di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007 jumlah pasar tradisional di Indonesia adalah 13.550. pada tahun 2009 menurun menjadi 13.450 pasar, dan pada tahun 2011 jumlah pasar tradisional menurun taham hingga angka 9.950. A.C. Nielson juga menyebutkan bahwa pertumbuhan pasar tradisional di Indonesia kurang dari 8,1 persen, sedangkan pasar modern berada pada angka 31,4 persen”(id.nielsen.com/news, 2015)

Adanya data tersebut menunjukkan bahwa, masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar modern di banding dengan pasar tradisional. Walaupun demikian daya saing pasar tradisional menurun keberadaannya tidak mungkin ditiadakan karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada pasar tradisional. Dengan adanya permasalahan tersebut Presiden mengeluarkan kebijakan program revitalisasi 5000 pasar hal tersebut bertujuan untuk menjaga keeksistensian pasar tradisional tersebut.

Menurut Danisworo (2002:13) bahwa “Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi.” Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat). Menurut data Kemendag, dalam 4 tahun terakhir revitalisasi sudah dilakukan terhadap 560 pasar rakyat, yang mana 52 di antaranya merupakan pasar percontohan. Dari program tersebut, mayoritas pasar mengalami kenaikan omset rata-rata 213%. Anggaran yang dibutuhkan untuk merevitalisasi 1 pasar rakyat adalah sekitar Rp2 miliar—Rp12 miliar di luar fasilitas publik. Untuk 2015, Kemendag menyediakan dana Rp997,5 miliar untuk merevitalisasi 469 unit pasar (industri.bisnis.com. 2016).

Maka sebagai tindak lanjut seluruh pemerintah daerah dihimbau untuk segera melaksanakan program tersebut. Salah satunya yaitu Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang diharapkan lebih memperhatikan pasar-pasar tradisional agar bisa terus berkembang untuk masa sekarang dan masa mendatang.

Keberadaan pasar-pasar tradisional bisa meningkatkan perekonomian daerah dan juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan retribusi pasar. Pemerintah juga berkewajiban membina dan memberikan pengawasan dalam menjaga mutu dan kualitas pasar-pasar tradisional. Meningkatkan pembinaan kepada pedagang dan pengelola pasar agar bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 15 Perpres 112 Tahun 2007, tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern:

Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, pemerintah daerah mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelolaan pasar tradisional, usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional, mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.

Selain Perpres 112 pasal 15 tahun 2007, lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa:

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Secara garis besar tujuan dari kedua kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional, agar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Terkait dengan Perpres 112 pasal 15 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Pemerintah Kabupaten Lumajang

harus memperhatikan jumlah pasar modern atau minimarket yang ada karena belakangan ini semakin menjamur keberadaannya. Bahkan, saking banyaknya minimarket yang dibangun, jarak antar lokasi minimarket yang satu dengan yang lain saling berdekatan. Kondisi inilah kemudian yang harus memaksa Pemkab Lumajang untuk melakukan pembatasan dan berkomitmen untuk menyetop pengajuan izin penambahan operasional toko modern. Hal ini dilakukan karena Pemkab Lumajang tidak ingin keberadaan minimarket sebagai bagian dari konsep pasar modern mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada keberadaan pasar tradisional yang ada dan menyebabkan persaingan yang tidak sehat.

Menurut Ir Nurul Huda Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Lumajang menjelaskan sudah melaksanakan, untuk perizinan pembukaan pasar modern seperti contoh minimarket dengan jarak minimal 500 meter dengan pasar tradisional. Sejauh ini Pemkab Lumajang telah menghentikan pemberian izin untuk pendirian minimarket di kawasan Kota Lumajang. Hal ini, karena di kawasan kota, keberadaan minimarket sudah sangat banyak. mencapai 22 outlet, yang saat ini tidak mungkin ditambah lagi. untuk wilayah Kecamatan kami batasi 2 lokasi untuk wilayah yang potensial. Untuk wilayah Kecamatan yang daya beli masyarakat dan tingkat persaingannya belum terlalu tinggi, hanya 1 lokasi saja yang di izinkan. Hal ini dilakukan, agar tidak sampai mematikan pasar tradisional yang dikelola masyarakat.

(http://www.suarasurabaya.net/print_news/Jaring%20Radio/2012/110192-Pemkab-Lumajang-Stop-Izin-Pendirian-Toko-Modern).

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sebenarnya sudah memperbaiki tatanan pasar tradisional yang umumnya dicitrakan kumuh, semrawut dan tidak tertata. Upaya renovasi pun telah direncanakan dan masuk dalam program Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang yaitu PAK (Program Anggaran Kerja) tahun 2011 dan tahun 2012. PAK tahun 2011 tentang revitalisasi pertokoan dan PAK tahun 2012 tentang proyek revitalisasi los, sehingga dari PAK tersebut bisa menciptakan pasar tradisional yang bernuansa modern. Dengan adanya program tersebut Pemerintah Daerah telah merevitalisasi sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lumajang. Pemerintah Daerah bersama dengan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang saling bahu-membahu agar citra pasar tradisional sesuai dengan apa yang diharapkan Dinas Pasar yaitu menjadikan pasar tradisional yang lebih terlihat bersih, tertata dan berkembang.

Di Kabupaten Lumajang terdapat 30 pasar tradisional, tetapi sampai saat ini baru 8 yang mendapatkan program revitalisasi dari pemerintah, antara lain sebagai berikut:

Tabel 01. Tahun Revitalisasi Pasar Tradisional di Kabupaten Lumajang

No	Nama Pasar	Tahun
1	Pasar Baru Lumajang	2011-2015
2	Pasar Sukodono	2013
3	Pasar Hewan Jogotrunan	2013
4	Pasar Ranuyoso	2014
5	Pasar Tempeh	2014

6	Pasar Kunir	2014
7	Pasar Klakah	2015
8	Pasar Candipuro	2015

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, 2016

Pasar Sukodono adalah salah satu pasar yang direvitalisasi lebih awal pada tahun 2013 bersama Pasar Hewan Jogotrunan dan Pasar Baru Lumajang pada tahun 2011 namun selesai pada tahun 2015. Pasar Sukodono adalah salah satu pasar kelas I di Kabupaten Lumajang yaitu pasar dengan skala besar. Dengan rincian 40 tempat pedagang kaki lima, 25 kios, 20 toko, mushola, WC/kamar mandi dan tempat parkir. (Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Tahun 2016)

Kondisi Pasar Sukodono sebelum di revitalisasi terkesan kumuh, tidak nyaman, jorok, serta tidak sehat. Kurang teraturnya tatanan pedagang dan juga menempatkan dagangan melebihi ketentuan disertai dengan pelayanan yang rendah. Dari kondisi tersebut berakibat menurunnya minat beli dari masyarakat. Sehingga tidak mampu bersaing dengan pasar modern. Pembangunan Pasar Sukodono sudah terlaksana, hanya saja masih terdapat permasalahan baru seperti banyaknya pedagang yang tidak mampu membeli kios baru, ada juga pedagang yang berjualan di luar karena mereka mempunyai alasan jika berjualan didalam jarang ada pembeli. Maka dari itu perlu adanya bantuan dari Dinas Pasar misalnya berupa pinjaman modal kepada para pedagang sebagai jalan keluar menyangkut permasalahan tersebut. Karena jika masalah tersebut tidak segera diatasi bukan tidak mungkin retribusi daerah akan

malah mengalami penurunan sehingga berdampak menurunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang.

Kondisi seperti inilah yang melatar belakangi perlu adanya pengkajian lebih dalam yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang mengenai pengelolaan Pasar Sukodono. Pasar sukodono merupakan salah satu pasar tradisional yang di revitalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 pasar yang direvitalisasi paling awal dan sepertinya merupakan tempat penelitian yang tepat untuk peneliti dalam mengkaji bagaimana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan uraian diatas mendorong peneliti untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional yang terjadi, untuk kemudian dijabarkan ke dalam laporan penelitian dengan judul **“Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Sukodono dan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan nilai kontribusi bagi beberapa pihak antara lain :

1. Aspek teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperluas wawasan dan memperdalam lagi pengetahuan tentang revitalisasi pasar tradisional.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan, referensi atau pertimbangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pasar dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pasar.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang hal- hal yang mendasari penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan yang akan memudahkan untuk memahami bab-bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dan konsep- konsep yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan menjelaskan tentang pengertian- pengertian yang berkaitan dengan penelitian. Adapun pada bab ini memuat mengenai teori tentang Administrasi publik, Administrasi pembangunan, Pembangunan daerah, Pemerintah daerah, Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Revitalisasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian meliputi fokus penelitian yaitu masalah yang menjadi perhatian utama untuk diteliti, sumber data yaitu orang yang terlibat dalam penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara- cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang

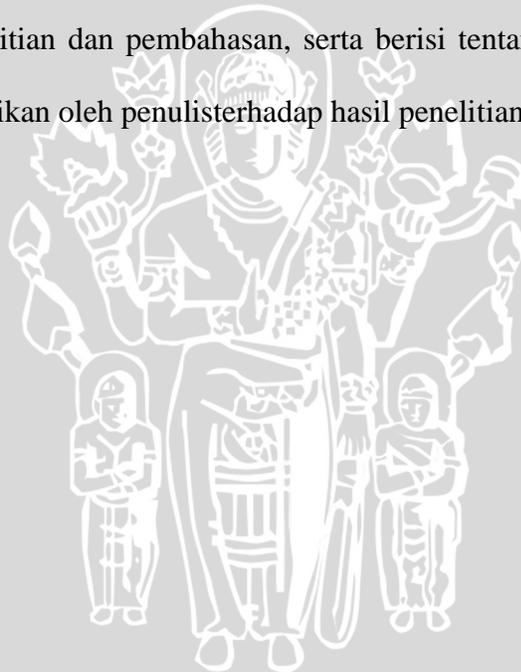
diperlukan, instrumen penelitian yang menerangkan alat yang akan digunakan dalam menggali dan menganalisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yang berisi hasil penelitian, penyajian data dan focus penelitian serta pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, serta berisi tentang saran-saran yang diberikan oleh penulisterhadap hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Adminstrasi Publik

Sebagian besar dari permasalahan yang terjadi dalam administrasi Negara adalah persoalan masyarakat. Administrasi publik merupakan satu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat tersebut. Gerald Caiden menjelaskan bahwa disiplin administrasi Negara ini pada hakekatnya adalah satu disiplin yang menggapai masalah-masalah pelaksanaan persoalan masyarakat (*public affairs*), dan manajemen usaha-usaha masyarakat (*public business*).

Hal ini meliputi segala sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai jawaban masyarakat terhadap masalah-masalah yang memerlukan pemecahan-pemecahan kolektif bukan perorangan. Perkembangan masyarakat membawa tuntutan-tuntutan masyarakat meningkat. Tuntutan-tuntutan tersebut membutuhkan jawaban, jika jawaban tidak sebanding dengan tuntutan maka akan timbul ketidakpuasan. Administrasi publik harus senantiasa bisa menjawab tuntutan dari masyarakat.

Candler dan Plano dalam Keban (2008:3) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik sebagai sebuah disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Dari penjabaran mengenai definisi administrasi publik diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah sebuah proses untuk menjalankan kebijakan/keputusan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kepentingan-kepentingan Negara.

B. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi publik. Administrasi pembangunan memiliki fokus analisis berupa proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman (Siagian:2005)

Selanjutnya, Siagian (2005:8) menyebutkan definisi administrasi pembangunan yaitu “Sebagai suatu usaha perumbuan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Selain itu, Tjokroamidjojo dalam Siagian (2005:9) menyebutkan bahwa administrasi pembangunan adalah “Proses pengendalian usaha oleh Negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa”.

2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi publik. Administrasi pembangunan memiliki fokus analisis berupa proses pembangunan dan memiliki ciri-ciri. Menurut Sondang P. Siagian dalam Tjokroamidjojo (1995:9-10) ada beberapa ciri administrasi pembangunan:

1. Lebih memberikan perhatian pada lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.
2. Administrasi pembangunan memiliki peran aktif dan kepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya melalui proses politik.
3. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat di masa depan.
4. Lebih berorientasi pada pembangunan (*development functions*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif seperti telah disebutkan terdahulu. Yang terakhir juga dapat disebutkan sebagai kemampuan dan pengendalian instrument-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai *development agent*.
5. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Dengan kata lain, administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
6. Dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparat pemerintah juga bisa merupakan pergerakan perubahan (*change agent*).
7. Lebih berpendekatan pada lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecah masalah (*problem solving*).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus guna mencapai tujuannya yaitu dalam meningkatkan bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

C. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah (*Local Government*)

Menurut Bhenyamin Hoessein (2001) sebagaimana dikutip oleh Nurcholis (2010:1.25) menjelaskan bahwa *local government* dapat mengandung tiga arti. Pertama, *local government* berarti pemerintah lokal. Kedua, *local government* berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Ketiga, *local government* berarti daerah otonom. Dari ketiga arti *local government* diatas, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. *Local government* dalam arti pertama menunjuk pada lembaga atau organnya. Maksudnya *local government* adalah organ atau badan atau organisasi pemerintah di tingkat daerah. Dengan kata lain, *local government* adalah wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah.
- b. *Local government* dalam arti kedua menunjuk pada fungsi atau kegiatannya. Dalam arti ini, *local government* sama dengan Pemerintahan Daerah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Istilah *local government* sering digunakan untuk fungsi pembentukan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat atau birokrat lokal.
- c. *Local government* dalam arti ketiga yaitu sebagai sebagai daerah otonom. Dalam pengertian ini *local government* memiliki otonomi (lokal) dalam arti *self government*, yaitu mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Dalam istilah administrasi publik masing-masing wewenang tersebut sering disebut sebagai wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*).

Sedangkan menurut pendapat Harris dalam Nurcholis (2010:1.26) menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah (*local government*) adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan) dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Daerah (*local government*) adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengenai pemerintahan di daerah.

2. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Adam Smith dalam Muluk (2006:57) menerangkan bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dengan masyarakat lainnya dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Sementara menurut Musgrave (1991) sebagaimana dikutip dalam Muluk (2006:58) mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods*. Selanjutnya, fungsi distribusi

merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat.

Sementara menurut Starling (1998) dalam Muluk (2006:59) menegaskan bahwa apapun caranya, tugas utama pemerintah yang membedakan dengan sektor swasta adalah untuk menyediakan *public goods* daripada *private goods*. Selain itu, tujuan yang dibebankan kepada pemerintah juga untuk menciptakan keadilan, meskipun ada tetapi jarang sekali yang berupaya menghasilkan laba. Ada banyak cara tentang bagaimana pemerintah melakukan tugasnya guna mencapai tujuan tersebut. Sejalan dengan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah adalah menyediakan layanan dan memberi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan pembangunan khususnya revitalisasi pasar tradisional dalam upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian secara merata agar mempermudah pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dan juga supaya pasar tradisional bisa bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

D. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang *fiat* (id.wikipedia.org/wiki/Pasar). Menurut Sudarman (1992:7) mendefinisikan pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menjual dan membeli barang dan jasa atau faktor-faktor produksi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Winardi (1992:106) bahwa pasar dalam arti sempit adalah tempat berkumpulnya sejumlah pembeli dan beberapa penjual dimana terjadi transaksi jual beli barang-barang yang ada disana.

Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau tempat interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan (Suprayitno, 2008:205). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, infrastruktur dan tempat bertemunya antara pembeli dan penjual serta terjadi transaksi jual beli barang dan jasa atau faktor-faktor produksi lainnya.

2. Jenis-jenis Pasar

a) Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan pedagangnya sebagian besar adalah orang pribumi (Sadilah, dkk. 2011:24).

Sedangkan Wikipedia mendefinisikan pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan bangunan biasanya terdiri dari kios atau gerai-gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur, telur, daging ikan, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue atau barang-barang lainnya (id.wikipedia.org/wiki/Pasar)

Secara umum pasar tradisional mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Menurut Feriyanto 2006 dikutip oleh Sadilah, dkk (2011:24) kekurangannya adalah kondisi tempat yang kumuh, becek, semrawut, panas, dan tidak aman. Sedangkan kelebihanannya adalah lokasinya strategis, yaitu dekat dengan permukiman, adanya tawar-menawar yang secara psikologis memberikan nilai positif pada proses interaksi penjual dan pembeli, menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif murah, karena jalur distribusi lebih pendek dan tidak terkena pajak atau pungutan lainnya.

Dari beberapa pengertian pasar tradisional diatas dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional adalah tempat jual beli yang biasanya berbentuk kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual atau suatu pengelola pasar, dimana konsumen masih bisa melakukan tawar-menawar sehingga tidak ada kepastian harga yang tetap dan biasanya usaha perdagangannya berskala kecil karena modalnya juga kecil.

b) Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di wilayah perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (Sinaga dalam Sitepu 2010:1). Barang yang dijual di pasar modern memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menjual barang-barang lokal, pasar modern juga menjual barang import. Barang yang dijual memiliki kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui proses penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijk/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kualitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak). Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa pasar modern adalah suatu tempat dimana konsumen dapat membeli barang-barang yang diinginkan yang dikelola dengan manajemen modern, tetapi di tempat ini tidak dapat lagi melakukan tawar menawar seperti pasar tradisional karena memiliki label harganya yang sudah pasti (tercantum harga sebelum dan sesudah dikenakan pajak). Salah satu contoh pasar modern adalah *supermarket, plaza/mall, minimarket, shopping centre, indomart* dan sebagainya.

3. Fungsi Pasar

Menurut Sudarman (1992:8-9) pasar memiliki lima fungsi utama kelima fungsi ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

a. Pasar menetapkan nilai (*sets value*)

Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai. Fungsi ini memecahkan masalah penentuan apa yang harus dihasilkan oleh suatu perekonomian. Barang yang relatif lebih tinggi dibanding dengan barang yang tidak diinginkan masyarakat. Akibatnya produsen tersebut akan terangsang untuk memperbesar produksinya, dan juga mendorong produsen-produsen baru untuk menghasilkan barang tersebut.

b. Pasar mengorganisir produksi

Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen memilih metode produksi yang paling efisien. Dalam ilmu ekonomi dianggap antara faktor-faktor produksi selalu mempunyai kemungkinan substitusi. Bila harga suatu faktor produksi mengalami kenaikan di pasar, maka produsen tersebut dan mencoba menggantinya dengan faktor pengganti yang lain yang harganya relatif lebih murah. Jadi fungsi pasar yang kedua ini memecahkan masalah bagaimana cara menghasilkan barang.

c. Pasar mendistribusikan barang

Hal ini menyangkut pertanyaan untuk siapa barang dihasilkan. Kemampuan seseorang untuk membeli barang tergantung pada penghasilannya. Penghasilan seseorang di samping tergantung pada beberapa unit jumlah faktor produksi yang dimiliki juga tingkat harga faktor produksi tersebut di pasar. Pola distribusi penghasilan bersama-sama dengan tingkat harga barang di pasar akan menentukan pola distribusi barang dalam suatu masyarakat. Dengan

menganggap pola pemilihan faktor produksi dari suatu masyarakat pada suatu saat tertentu bentuknya, maka gerak harga barang dan faktor produksi akan menentukan distribusi barang yang dihasilkan masyarakat.

d. Pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan (*rationing*)

Penjatahan adalah inti dari adanya harga. Karena jumlah produksi yang tersedia dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu terbatas jumlahnya, maka jumlah tersebut haruslah dibagi-bagi sehingga dapat “cukup” dalam jangka waktu tertentu. Barang yang jumlahnya relatif sedikit didalam suatu perekonomian, maka tingkat harga barang tersebut di pasar tinggi. Tingginya tingkat harga barang tersebut akan membatasi tingkat konsumsi sekarang.

e. Pasar mempertahankan dan mempersiapkan dimasa yang akan datang

Tabungan dan investasi semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha untuk mempertahankan dan mencapai kemajuan tingkat konsumsi sekarang.

E. Revitalisasi

1. Pengertian Revitalisasi

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran atau degradasi. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Istilah revitalisasi ini, berarti suatu upaya untuk menciptakan eksistensi yang baru lagi keadaan yang sekarang. Gerakan revitalisasi secara khusus terjadi dalam kondisi-kondisi ketergantungan atau krisis

sosial yang ekstrim, dalam masa perubahan sosial yang tepat ketika orang-orang terbangun dan mengalami disorientasi dari pola-pola kehidupan tradisional mereka (Sanderson, 1993:532).

Menurut Krisnamurthi (2006:5) revitalisasi memiliki tiga pilar pengertian, yaitu:

Pertama, sebagai kesadaran akan pentingnya dalam arti vitalnya bagi kehidupan bangsa dan rakyat; kedua, revitalisasi sebagai bentuk rumusan masa depan akan kondisi pertanian; serta ketiga, pengertian revitalisasi sebagai kebijakan dan strategi besar melakukan proses untuk proses revitalisasi. Revitalisasi juga diartikan sebagai usaha, proses dan kebijakan untuk menyegarkan kembali daya hidup, memberdayakan kemampuannya, membangun daya saing, meningkatkan kinerja, serta menyejahterakan pelakunya.

Kaitannya dengan peran pasar tradisional adalah pertama harus berdasarkan kesadaran politik bahwa pasar merupakan suatu yang penting, kemudian harus diikuti dengan keinginan politik untuk kemajuan pasar tradisional. Selanjutnya harus disertai dengan keputusan politik yang utamanya menyangkut penetapan prioritas, pengembangan program dan alokasi sumber daya.

Menurut Jhingan (1998:543) pada fase awal pembangunan, investasi harus dilakukan di bidang-bidang ekonomi eksternal yaitu yang mengarah pada penciptaan *overhead* sosial dan ekonomi seperti tenaga, transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Perubahan organisasi memainkan peranan dalam pembangunan ekonomi, perubahan tersebut adalah mencakup pengembangan pasar dan organisasi pasar. Pemerintah kemudian membangun sarana transportasi dan komunikasi untuk perubahan pasar.

Prinsip pelaksanaan revitalisasi pasar yaitu pelaksanaan revitalisasi tidak terpisah dengan pengembangan kawasan sekitarnya. Revitalisasi pasar dapat

mengubah seluruh atau sebagian bangun pasar. Revitalisasi pasar merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang sehingga perlu membangun pasar yang representatif (Bima, 2007:1). Revitalisasi pasar hendaknya tidak menggusur komunitas tradisional pedagang yang telah berjualan puluhan tahun di kawasan tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern. Cara yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli serta penambahan fasilitas, selain itu pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional juga harus memperhatikan kesejahteraan para pedagang yang telah lama berjualan di pasar tersebut. Sedangkan menurut Bowo (2007:1) menyatakan:

Revitalisasi pasar tradisional mutlak dibutuhkan untuk dapat bersaing dengan pasar modern (*hypermarket*), melalui penataan yang mengutamakan pelayanan dan kenyamanan yang diyakini akan mampu menarik kembali minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Lewat penataan kembali pasar tradisional yang memperhatikan aspek kenyamanan, pelayanan dan keamanan, maka potensi yang dimiliki pasar tradisional akan meningkat.

Dalam proses revitalisasi diperlukan peran yang lebih besar dari para pedagang dan masyarakat pasar itu sendiri. Berkaitan dengan penataan pasar seharusnya jangan merugikan pihak pedagang. Menurut Muchsin seperti yang dikutip dalam Rangku (2007:1) mengatakan:

Pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan revitalisasi pasar tradisional, baik itu dalam membuat konsepnya, maupun dalam memilih pengembang. Revitalisasi itu bukan hanya berorientasi pada fisik bangunannya saja, akan tetapi juga harus ada konsep bagaimana mendinamiskan pasar. Melaksanakan revitalisasi pasar tidak sama dengan merevitalisasi bangunan yang lainnya, jika salah menatanya pasar malah bias menjadi sepi.

Pemerintah seharusnya serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selama ini pasar tradisional selalu identik dengan tempat belanja yang kumuh, becek serta bau sehingga hanya bisa didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah. Gambaran pasar yang demikian harus mampu diubah dengan menilai keberadaan pasar yang terlihat bersih, serta nyaman bagi para pengunjung. Dengan demikian masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional.

Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan peningkatan kegiatan perekonomian harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan dari para pengunjung dan pedagangnya. Selain itu, pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional harus tetap mempertahankan suatu konsep pasar yang telah ada dalam masyarakat serta memperhatikan penataan letak pedagang. Dengan dilaksanakannya revitalisasi maka akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam pasar tersebut.

2. Konsep Pengelolaan dan Revitalisasi Pasar Tradisional

Menurut Mulyadi (2010:7) model pengelolaan pasar tradisional yang ideal adalah dengan membagi ke dalam dua sisi yaitu dari segi fisik yang ditinjau dari segi aspek bangunan dan infrastruktur, dan non fisik ditinjau dari aspek manajemen pengelolaan pasar.

a. Segi fisik

- 1) Aspek bangunan yaitu renovasi bangunan sesuai dengan kebutuhan konsumen, konstruksi bangunan menggunakan bahan yang tahan lama, arsitektur bangunan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya, serta pemeliharaan pasar secara berkala.
- 2) Aspek infrastruktur yaitu meliputi aspek diantaranya adalah:
 - a) Pembuatan maupun perbaikan terhadap saluran air bersih yang dapat dipergunakan oleh pedagang atau pengunjung dan perbaikan saluran air kotor agar lancar.
 - b) Perbaikan sistem drainase yang baik dan memadai, perbaikan dan pemisahan akses jalan yang dilalui oleh pejalan kaki dan akses kendaraan.
 - c) Pemisahan arus sirkulasi barang dengan pengunjung yang baik keluar maupun yang masuk
 - d) Perbaikan dan pengadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti ATM, P3K, toilet dan tempat ibadah yang memadai.
 - e) Tersedianya tempat parkir yang memadai dan aman.
 - f) Perlu pengaturan sistem zoning berdasarkan barang yang dijual, dan perlu ada pemisahan antara komoditi basah dan kering.
 - g) Perlu adanya papan petunjuk arah zoning yang menjadi panduan bagi pengunjung.
 - h) Perlu ada tempat penampungan sampah yang memadai sesuai kapasitas yang dibutuhkan.

i) Perlu ada fasilitas bongkar muat yang memadai.

b. Segi non fisik

1) Manajemen pengelolaan pasar yaitu meliputi:

- a) Perlu memikirkan kepentingan-kepentingan pedagang dan pengunjung pasar.
- b) Manajemen pengelolaan harus transparan dan profesional dengan memperhatikan prinsip *good corporate governane*.
- c) Pengelolaan pasar harus memiliki wawasan yang luas kemampuan berfikir secara holistik serta visi dan misi yang jelas.
- d) Perlu kemampuan untuk menyusun peraturan tata letak pasar (layout). Pengelolaan memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan institusi pasar.
- e) Perlu adanya sanksi yang tegas atas penunggakan retribusi
- f) Pedagang perlu mengkhususkan diri untuk menjual satu jenis barang dagangan sesuai dengan zoning komoditas.
- g) Perlu ada standar mutu barang yang diperdagangkan.
- h) Terdapat sistem informasi harga barang pasokan dan kemampuan negosiasi dengan pemasok
- i) Pedagang memberikan harga yang lebih transparan kepada konsumen, penempatan dagangan harus rapi, tertib, aman dan tidak boleh melebihi batas tempat dagangan.
- j) Masyarakat harus diikut sertakan dalam pengelolaan pasar

- k) Semua pedagang harus punya SHP (Surat Hak Penempatan) dan KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pedagang)
- l) Implementasi peraturan lokasi pasar modern yang supaya tidak mematikan pasar tradisional.
- m) Perlu ada pembatasan komoditi bagi pasar modern khususnya komoditi basah.
- n) Perlu mengatur waktu operasi yang jelas bagi pasar modern sehingga mematikan pasar tradisional.
- o) Pembinaan terhadap dinas dan pengelola oleh pemerintah pusat, dan perlu pembinaan terhadap pedagang oleh kantor dinas pemerintah kota secara periodik
- p) Perlu tersosialisasinya program bantuan kredit bagi pedagang kecil melalui program kemitraan UKM (Usaha Kecil Menengah) baik melalui pemerintah atau lembaga keuangan lainnya.
- q) Konsistensi atau harmonisasi kebijakan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah kota/kabupaten

Sedangkan konsep revitalisasi pasar tradisional menurut Rizal (2013:5-7)

terbagai menjadi empat aspek, diantaranya adalah:

- a. Aspek tata kelola dan kelembagaan pasar
Tata kelola pasar tradisional yang buruk menjadi hambatan revitalisasi dan berpotensi memandulkan program perbaikan fisik pasar. Aspek tata kelola ini harus menentukan kedinasan mana yang bertanggung jawab dalam program revitalisasi pasar tradisional ini dan kedinasan tersebut harus melakukan koordinasi yang kuat dengan instansi, kedinasan yang lainnya atau pihak penyedia jasa finansial dalam pelaksanaannya. Serta harus ditentukan parameter-parameter pengukur keberhasilan kinerjanya. Jangan sampai ada duplikasi program antar instansi atau antar kedinasan perha program revitalisasi ini.

- b. Aspek finansial
Penguatan permodalan pada para pedagang, seperti akses terhadap jasa keuangan serta skema pembiayaannya. Ini jangan hanya dijadikan program di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan agar para pedagang yang sebagian dari kalangan menengah ke bawah bisa meningkatkan permodalannya.
- c. Aspek distribusi dan kontrol kualitas barang
Aspek distribusi dan kontrol kualitas barang yang sampai saat ini tidak pernah diprogramkan. Dari hasil penelitian RICA (*Rural Investment Climate Assesment*) pada tahun 2005 bahwa ditemukan kualitas barang yang dipasokan ke pasar tradisional bermutu rendah atau bahkan limpahan dari pasar modern yang rijek.
- d. Aspek perbaikan sarana fisik dan infrastruktur pasar
Perbaikan sarana fisik dan infrastruktur pasar yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam program revitalisasi pasar. Namun perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat saat pembangunannya sangat sekali perlu ditingkatkan agar nantinya fisik bangunan dan infrastruktur yang bagus bisa digunakan dalam jangka panjang dan tidak mubazhir.

Dalam konsep pengelolaan dan revitalisasi pasar tradisional tersebut lebih luas, tidak sekedar perubahan pada fisik saja, tetapi juga harus ada konsep bagaimana mendinamiskan pasar. Dalam hal ini, adanya program revitalisasi pasar tradisional diharapkan akan membuat perkembangan pasar tradisional, sehingga tidak kalah saing dengan pasar modern dan akhirnya masyarakat merasa terpenuhi dan terlayani kebutuhannya oleh pasar tradisional, dan juga akan tetap mempertahankan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat.

Secara normatif kebijakan tentang penataan pasar tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern. Secara garis besar tujuan dari kedua kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha kecil, koperasi

dan pasar tradisional, agar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta landasan teori maka metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan, untuk melihat situasi dan kondisi dari pembangunan pasar tradisional di Pasar Sukodono kabupaten Lumajang. Sejalan dengan uraian tersebut, menurut Moleong (2005:11) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang data-datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya.

Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif tersebut, diharapkan mampu melihat proses penelitian yang dilakukan dengan hasil memperoleh penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai pembangunan pasar tradisional di Pasar Sukodono kabupaten Lumajang berdasarkan data yang didapatkan dari berbagai

sumber baik tulisan maupun lisan. Sumber berupa tulisan berasal dari dokumen resmi yang dimiliki Dinas Pasar kabupaten Lumajang dan sumber lisan berdasarkan hasil wawancara.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu obyek yang merupakan tujuan utama untuk meneliti fenomena sosial yang terjadi atau menangkap data-data yang akan dikumpulkan dan kemudian menganalisisnya. Menurut Moleong (2005:94) fokus penelitian adalah suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk :

1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang inkuiri (masukan). Misalnya ketika peneliti membatasi pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
2. Memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (masukan dan keluaran) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan adanya fokus penelitian maka seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang akan diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan.

Berdasarkan pernyataan di atas, adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang

- a. Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan Pasar
 - b. Aspek Finansial
 - c. Aspek Distribusi dan Kontrol Kualitas Barang
 - d. Aspek Perbaikan Sarana Fisik dan Infrastruktur
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Revitalisasi pasar tradisional di

Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang:

- a. Faktor pendukung
 - 1) Sumber daya anggaran
 - 2) Lokasi
- b. Faktor penghambat
 - 1) Sumber daya manusia
 - 2) Pihak ketiga atau kontraktor
 - 3) Kebijakan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang. Pasar Sukodono merupakan pasar yang pertama kali di revitalisasi di Kabupaten Lumajang pada tahun 2011-2012. Disamping itu juga setelah dilakukanya revitalisasi, ternyata masih menimbulkan permasalahan yaitu dampak revitalisasi Pasar Sukodono terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dapat diambil. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan situs penelitian pada:

1. Dinas Pasar Kabupaten Lumajang yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 25, Kec. Lumajang, kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316.
2. Pasar Sukodono yang terletak di kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung hal-hal atau masalah focus yang menjadi focus penelitian peneliti. Menurut Lofland (1984) dalam Moelong (2005:157) "Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain." Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden. Data primer dapat diperoleh dengan cara mengamati atau melakukan wawancara dengan informan yang ada di lapangan sesuai dengan substansi penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan di Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dan Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang yang meliputi:

- a. Bapak Teguh Widjayono selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.
- b. Bapak Anshori selaku Kepala Bidang Perijinan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.

- c. Bapak Supangat selaku Kepala Bidang Ketertiban Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.
- d. Ibu Lilik Kusminiwati, S.Sos, SH selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.
- e. Bapak Satori selaku Kepala Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.
- f. Bapak Bumin Akhmadi selaku Staf Administrasi Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.
- g. Bapak Agung Pribadi S.AP selaku Mantan Kepala Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah tersedia bagi peneliti dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan. Dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder berupa sumber tertulis atau dokumen yang meliputi:

- a. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- c. Program Anggaran Kerja (PAK) Kabupaten Lumajang Tahun 2011 dan Tahun 2012. Program Anggaran Kerja Tahun 2011 Tentang Revitalisasi Pertokoan dan Program Anggaran Kerja tahun 2012 Tentang Proyek Revitalisasi Los.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Arikunto (2006:134) adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang terlihat penglihatan tetapi dapat diperhatikan penggunaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung ataupun tidak langsung pada objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini, observasi dilakukan pada aparatur negara yaitu Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dan pengamatan di Pasar Sukodono untuk mengetahui pembangunan pasar tradisional di Pasar Sukodono kabupaten Lumajang.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten guna dimintai keterangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan:

- a. Bapak Teguh Widjayono selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.
- b. Bapak Anshori selaku Kepala Bidang Perijinan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.

- c. Bapak Supangat selaku Kepala Bidang Ketertiban Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.
- d. Ibu Lilik Kusminiwati, S.Sos, SH selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.
- e. Bapak Satori selaku Kepala Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.
- f. Bapak Bumin Akhmadi selaku Staf Administrasi Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.
- g. Bapak Agung Pribadi S.AP selaku Mantan Kepala Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumen-dokumen, arsip-arsip ataupun literatur yang terkait dan berhubungan dengan obyek atau fokus penelitian. Dokumentasi didapatkan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen, arsip-arsip, dan foto kegiatan penelitian yang terdapat hubungannya dengan pembangunan pasar tradisional di Pasar Sukodono kabupaten Lumajang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau menggunakan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dan juga memiliki kedudukan yang strategis didalam proses kegiatan penelitian yang

digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2009:134). Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Peneliti Sendiri

Peneliti sebagai instrumen utama (*instrument guide*) dan mendasar. Didalam melakukan pengamatan mengenai implementasi analisis jabatan dan analisis beban kerja. Secara langsung peneliti menggunakan panca indera untuk melihat, mendengar, serta merasakan fenomena yang ada disekitarnya, terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara atau interview guide merupakan rangkaian daftar pertanyaan untuk melakukan pengumpulan data, yang berkaitan dengan pembangunan pasar tradisional di Pasar Sukodono kabupaten Lumajang. Hal ini berfungsi agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisikan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang diajukan kepada informan.

3. Catatan Lapangan (*field note*)

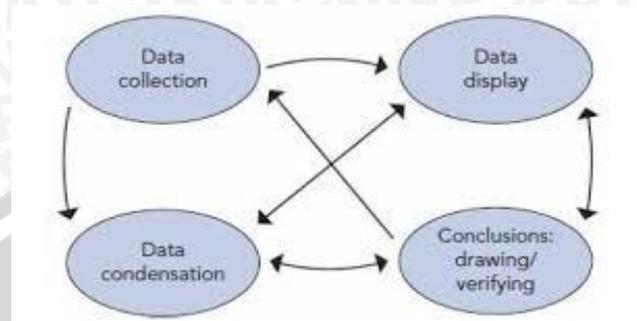
Catatan lapangan atau field note merupakan sebuah catatan peneliti yang didapatkan dari hasil mencatat ataupun mengcopy file atau data yang berkaitan dengan pembangunan pasar tradisional di Pasar Sukodono kabupaten Lumajang. Catatan lapangan memiliki fungsi untuk mencatat hasil wawancara atau pengamatan yang berisi tentang data atau informasi yang didapat dari Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.

4. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang yaitu berupa alat tulis untuk membantu dalam mencatat hal-hal penting dilapangan, kamera untuk pengambilang gambar yang ada kaitannya penelitian dan tape recorder untuk merekam saat wawancara dengan informan di Dinas Pasar kabupaten Lumajang dan Pasar Sukodono.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data primer maupun sekunder. Oleh karena itu, dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, maka peneliti harus mengadakan analisis data terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis-analisis berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah. Peneliti menggunakan rancangan analisa data menurut model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini dikarenakan sifat penelitian ini bersifat interaktif, yaitu peneliti melakukan penelitian dilapangan dan berinteraksi secara langsung dengan sumber informan. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles, Hubberman dan Saldana. Adapun model analisis data interaktif oleh Miles, Hubberman, dan Saldana sebagai berikut:

Gambar 01. Model Interaktif Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

Sumber: Matthew B. Miles dan Huberman dalam Saldana (2014:33)

Komponen analisis data model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Koleksi (*Data collection*)

Data collection merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan atau merubah data yang ditemukan di lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil interview, dokumen, dan fakta di lapangan. Dengan kondensasi data, data akan menjadi lebih kuat. (mengindari proses reduksi data karena menjadikan data yang di dapatkan menjadi lebih lemah dikarenakan ada beberapa data yang akan hilang).

2. Penyajian data (*data display*)

Secara umum dapat diartikan mengorganisasi, menyusun data atau informasi sehingga memudahkan peneliti memahami makna dan suatu data dan sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan.

Peneliti dalam proses ini berupaya menentukan batasan penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian akan didapat pemahaman mengenai apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut dan tentu saja pada tahap ini sangat membutuhkan input data dari hasil pengumpulan data dan juga telah melalui pemilahan data-data yang diperlukan sebelumnya.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Ketiga tahapan analisis data tersebut, pada dasarnya sebagai sesuatu yang saling menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Sehingga dalam penelitian kualitatif, analisis data pada akhirnya akan lebih banyak didominasi oleh kata, kalimat dan ungkapan serta sedikit menggunakan data berupa angka.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kabupaten Lumajang

a. Kondisi Geografi

Kabupaten Lumajang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 54 tahun 2010, pada bagian gambaran umum kondisi daerah ini diuraikan tentang kondisi geografi dan demografi. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jember;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang;

Kabupaten Lumajang terletak pada 112°50' - 113°22' Bujur Timur dan 7°52' - 8°23' Lintang Selatan, dengan luas wilayah keseluruhan 1790,90 km² atau 3,74 persen dari luas provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi mulai dari 0 sampai dengan diatas 2000 m di atas permukaan laut dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100-500 mdpl dari permukaan laut 63.109,15 Ha (35,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0-25 mdpl yaitu 6.889,4 Ha atau 3,85% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Lumajang. Dengan luas wilayah tersebut unit pemerintahan Kabupaten Lumajang terdiri dari



21 kecamatan, yaitu kecamatan lumajang, tempursari, pronojiwo, candipuro, pasirian, tempeh, yosowilangun, rowokangkung, jatiroto, randuagung, psrujambe, senduro, ranuyoso, sumbersuko, tekung, kunir, Sukodono, padang, gucialit, klakah, kedungjajang lalu 205 desa/kelurahan, 1.737 RW dan 7.027 RT.

Gambar 01. Peta Kabupaten Lumajang



Sumber: lumajangkab.go.id

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2013 sebanyak 1.086.669 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 528.129 jiwa dan perempuan sebanyak 558.540 jiwa. Dari sisi kepadatan penduduk, Kabupaten Lumajang tingkat kepadatan penduduk rata-rata adalah 695 jiwa/km². Apabila dilihat dari tingkat kepadatan

penduduk per kecamatan, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Lumajang (3.123 jiwa/ km²), diikuti dengan Kecamatan Sukodono (1.793 jiwa/km²) dan Kecamatan Sumbersuko (1.369 jiwa/km²). Sex ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan dikalikan 100. Pada tahun 2012 setiap 100 penduduk perempuan di Indonesia terdapat 98 penduduk laki-laki. Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2012 pertumbuhan penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1.292 jiwa atau 0,19 persen.

Tabel 02. Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang Menurut Jenis Kelamin, Kepadatan dan Rasio Seks Tahun 2013

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Luas Area Km ²	Kepadatan	Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan				
1	Tempursari	15,424	16,717	32,141	101.36	317	9,993
2	Pronojiwo	17,890	19,156	37,046	38.74	956	11,111
3	Candipuro	34,337	35,789	70,126	144.93	484	21,765
4	Pasirian	41,583	43,470	85,053	183.91	462	25,990
5	Tempeh	39,801	41,029	80,830	88.05	918	24,475
6	Kunir	26,201	27,769	53,970	50.18	1,076	16,910
7	Yosowilangun	30,016	31,305	61,321	81.30	754	20,033
8	Rowokangkung	17,958	19,499	37,457	77.95	481	12,131
9	Tekung	16,769	18,079	34,848	30.40	1,146	10,814
10	Lumajang	43,117	44,329	87,446	30.26	2,890	27,610
11	Pasrujambe	19,620	20,832	40,452	97.30	416	11,380
12	Senduro	22,879	24,061	46,940	228.68	205	14,162
13	Gucialit	11,916	13,602	25,518	72.83	350	7,655
14	Padang	17,183	18,941	36,124	52.79	684	10,872
15	Sukodono	25,862	27,207	53,069	30.79	1,724	15,926
16	Kedungjajang	21,062	23,239	44,301	92.33	480	12,829
17	Jatiroto	23,746	25,104	48,850	77.06	634	14,874
18	Randuagung	31,717	32,814	64,531	103.41	624	19,511
19	Klakah	30,655	32,091	62,746	83.67	750	18,399
20	Ranuyoso	23,725	25,096	48,821	98.42	496	13,495
21	Sumbersuko	16,668	18,411	35,079	26.54	1,322	11,077
Jumlah		528,129	558,540	1,086,669	1,790.90	607	331,012

Sumber : Hasil Konsolidasi Data Base Dalam Negeri

c. Lambang, Visi dan Misi

1) Lambang



Gambar 03. Lambang Daerah Kabupaten Lumajang
Sumber: Website resmi Kabupaten Lumajang
(lumajangkab.go.id)

Makna Lambang Daerah :

a) Keterangan Bentuk Gambar Lambang.

- 1) Lambang berbentuk perisai segi enam tak beraturan yang distilir secara simetris dengan bingkai pada kelilingnya.
- 2) Di bagian tengah lambang terlukis perpaduan yang terdiri atas tugu nasional kota Lumajang latar belakang gunung Semeru dengan nyala api dipuncaknya dan petak-petak sawah dengan dikelilingi untaian daun tembakau yang berjumlah delapan.
- 3) Melingkar disebelah kiri dan kanan adalah untaian padi dan kapas yang masing-masing berjumlah empat empat puluh lima dan tujuh belas. Di atasnya terlukis bintang segi lima beraturan.
- 4) Di bagian atas Lambang bertuliskan bertuliskan kata : "KABUPATEN LUMAJANG" dan dibawah lambang didalam sehelai pita tertulis kata : "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI" sebuah sasanti/motto dalam bahasa Kawi.

b) Keterangan Warna Gambar Lambang

- 1) Dasar perisai pada Lambang berwarna hijau tua dengan bingkai berwarna Merah Putih.
- 2) Tugu tampak sebagai sillouet berwarna putih kontur hitam. Gunung berwarna biru muda dan nyala api berwarna merah putih. Petak-petak sawah berwarna hijau tua dan tembakau berwarna coklat dengan tulang daun hitam.
- 3) Padi dan kapas berwarna putih.
- 4) Bintang segi lima berwarna kuning dengan kontur putih.
- 5) Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" berwarna putih. Pita dan sasanti berwarna putih dan tulisan hitam.

c) Keterangan Makna Gambar Lambang

- 1) Bentuk perisai pada lambang melukiskan sikap jiwa yang tahan uji, tabah dan penuh ketetapan hati sebagai dasar dari tiap perbuatan manusia. Warna hijau mencerminkan rasa kedamaian, persahabatan dan toleransi, sekaligus menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Lumajang.
- 2) Bingkai merah putih langsung mengungkapkan hubungan rasa kebangsaan sebagai suatu kesatuan dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.
- 3) Paduan yang terlukis dibagian tengah menggambarkan tugu Nasional Kota Lumajang yang menunjukkan kekhususan monumental daerah dengan menandai pada Lumajang sebagai ibu kota Kabupaten.

- 4) Melatarbelakangi tugu tersebut adalah unsur-unsur geografis daerah Lumajang dengan gunung apinya yang terkenal : Semeru sebagai gunung paling tinggi di Pulau Jawa. Dalam mitos pewayangan dikenal sebagai Mahameru, tempat dewa-dewa bersemayam. Suatu tempat tertinggi dimana garis-garis kebijaksanaan dalam mengatur perikehidupan bersama-sama ditetapkan.
- 5) Sedangkan petak-petak sawah melukiskan salah satu unsur terpenting dan yang terutama didaerah Lumajang, ialah unsur agraris. Pertanian didaerah Lumajang, yang utama adalah padi, yang kedua merupakan usaha yang vital dan potensial adalah tembakau, pada lambang dilukiskan sebagai rangkaian daun-daun tembakau yang melingkar ke kiri dan ke kanan.
- 6) Nyala api dipuncak gunung merupakan dinamika yang menjiwai setiap unsur kehidupan bagaikan nyala api gunung Semeru yang tak kunjung padam.
- 7) Untaian padi dan kapas melukiskan sikap hidup sosialis bangsa dengan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila adalah merupakan tema yang mengilhami setiap gairah pembangunan.
- 8) Bilangan-bilangan tujuh belas pada kapas, delapan pada tembakau dan empat puluh lima pada padi mengungkapkan Semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menjiwai kerja, setiap unsur pembangunan di Lumajang.

9) Bintang segilima di bagian atas melukiskan Pancasila, falsafah negara dan sikap hidup bangsa Indonesia yang wajib dijunjung tinggi dan diagungkan, sebagaimana telah disebutkan pada sila Pertama Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Merupakan dasar dan tujuan hidup Bangsa Indonesia justru karena Pancasila wajib diikrarkan dan diamalkan.

10) Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" di bagian atas menyebutkan nama daerah yang digambarkan dan diungkapkan pada lambang.

11) Sedangkan pita dibagian lambang menyebutkan sasanti/motto dalam bahasa Kawi : "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI" yang maknanya : kebajikan yang kekal abadi adalah sikap perbuatan Ksatria dan penuh pengabdian. Suatu aspirasi dinamis yang diperlukan dalam mengamalkan jiwa Pancasila demi Amanat Penderitaan Rakyat.

2) Visi

Kabupaten Lamongan memiliki visi yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera dan Bermartabat"

3) Misi

Kabupaten Lumajang memiliki misi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.

2. Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Dinas Pasar

Dinas Pasar Kabupaten Lumajang sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah kabupaten Lumajang Nomor 44 tahun 2007 merupakan dinamisor dan akselerator pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintah dibidang pengelolaan pasar yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang pengelolaan pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 2007 tentang penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang bahwasanya Dinas Pasar ini dahulunya masih masuk dalam lingkup Dinas Pendapatan Daerah yang waktu itu dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Dinas Pasar

Dengan ditetapkannya PERDA Nomor 44 tahun 2007, maka berubahlah DIPENDA menjadi Dinas Pasar yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2007 dan mulai efektif sejak 3 maret 2008, dengan beralamat di Jalan A. Yani No.25 Lumajang.

Berubahnya Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) menjadi Dinas Pasar berpengaruh terhadap sistem kepemimpinannya, kepemimpinan yang pertama yaitu dijabat oleh Drs. Amat yang kemudian dialih tugaskan asisten Tata Praja Kabupaten Lumajang. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan sebagai Kepala Dinas Pasar ditunjuk Drs. Chodiri yang semula menjabat sebagai Camat wilayah Senduro untuk kemudian menduduki jabatan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang. Setelah yang bersangkutan pensiun, jabatan Kepala Dinas Pasar dijabat lagi bapak Drs. Amat dari tahun 2009 sampai sekarang.

Dinas Pasar Kabupaten Lumajang ini merupakan salah satu perangkat daerah yang pembentukannya berdasarkan aturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 124 yaitu:

1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
2. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
3. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tentang susunan organisasi, tata kerja, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pasar selaku perangkat daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 2007 yang antara lain tertuang di dalam pasal 3 dan 4 yang berbunyi:

Pasal 3: Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pengelolaan pasar berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan.

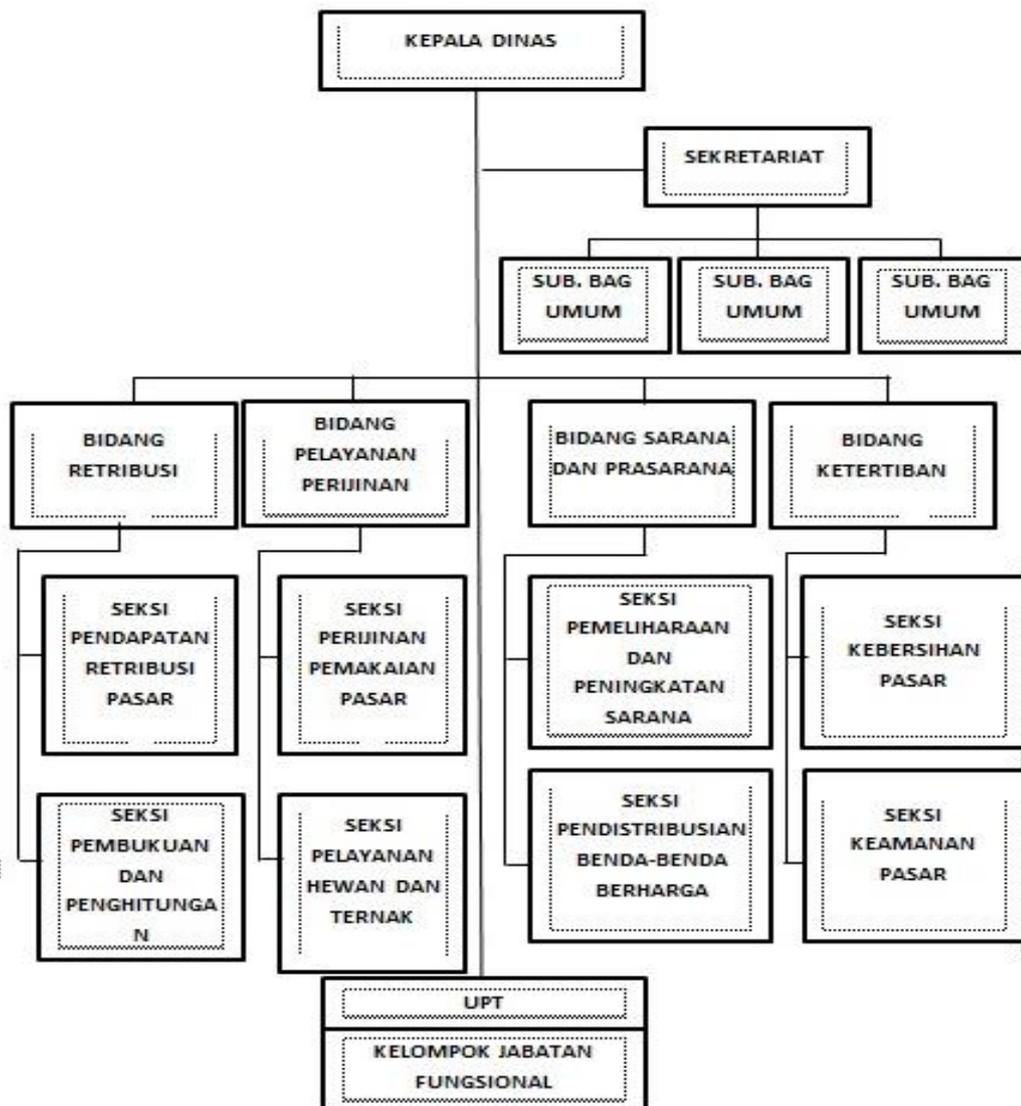
Pasal 4: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,

Dinas Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar, dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Dari bunyi pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa tugas dan tanggung jawab Dinas Pasar adalah merumuskan kebijakan serta melakukan pelayanan umum dan melakukan pembinaan pasar.

Gambar 04. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang



Sumber: Kantor Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, 2016

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dari struktur Dinas Pasar Kabupaten Lumajang seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pasar

Kepala Dinas Pasar mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang pasar berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Pasar yang telah ditetapkan.
 - c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Pasar.
2. Sekretaris Dinas Pasar

Sekretaris Dinas Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pasar berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin, melaksanakan tugas dan fungsi kesekretarian
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf sekretaria
- c. Sub bagian umum
- d. Sub bagian kepegawaian
- e. Sub bagian keuangan

3. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan memberikan layanan internal.

a. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan tanggung jawab kepada sekretaris

b. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi sub bagian umum
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf sub bagian umum

4. Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian pada Dinas pasar.

a. Sub bagian kepegawaian dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan tanggung jawab kepada sekretaris

b. Kepala sub bagian kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Memimpin, melaksanakan tugas dan fungsi sub bagian kepegawaian
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf sub bagian kepegawaian

5. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan penatausahaan administrasi keuangan pada Dinas Pasar.

a. Sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan tanggung jawab sekretaris

b. Sub bagian keuangan mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi sub bagian keuangan
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf bagian keuangan

6. Bidang Retribusi

Bidang retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi pasar atau pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar.

a. Bidang retribusi dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Dinas

b. Kepala bidang retribusi mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dibidang retribusi
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana retribusi

c. Bidang retribusi dibawah:

- 1) Seksi pendapatan retribusi pasar
- 2) Seksi pembukuan dan perhitungan

7. Seksi Pendapatan Retribusi

Seksi Pendapatan Retribusi Pasar mempunyai tugas membantu bidang retribusi dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan.

a. Seksi pendapatan retribusi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Bidang Retribusi

b. Kepala seksi bidang retribusi mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi pendapatan retribusi.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf seksi pendapatan retribusi pasar

8. Seksi Pembukuan dan Penghitungan

Seksi pembukuan dan penghitungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Retribusi dalam melaksanakan pembukuan hasil pemungutan retribusi dan pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar.

- a. Seksi pembukuan dan penghitungan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Bidang Retribusi
- b. Kepala seksi pendapatan retribusi mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi pembukuan dan penghitungan
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf seksi pembukuan dan penghitungan

9. Bidang Pelayanan dan Perijinan

Bidang pelayanan dan perijinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan program dan menyusun tugas teknis penyelenggaraan pelayanan perijinan, pemakaian pasar dan pelayanan hewan ternak.

- a. Bidang Pelayanan dan Perijinan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Pelayanan dan Perijinan mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi bidang pelayanan perijinan.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan bidang pelayanan dperijinan.

c. Kepala Bidang Pelayanan dan Perijinan membawahi:

- 1) seksi perijinan pemakaian pasar
- 2) seksi pelayanan hewan dan ternak

10. Seksi Perijinan Pemakaian Pasar

Seksi perijinan pemakaian pasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam melaksanakan penagihan dan pemantauan hasil pemungutan retribusi perijinan.

a. Seksi perijinan dan pemakaian pasar dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perijinan.

b. Kepala seksi perijinan pemakaian pasar mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi bidang perijinan pemakaian pasar.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf seksi perijinan pemakaian pasar.

11. Seksi Pelayanan Hewan dan Ternak

Seksi pelayanan hewan dan ternak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Perijinan dalam melaksanakan pemberian pelayanan terhadap hewan dan ternak.

- a. Seksi pelayanan hewan dan ternak dalam melaksanakan tugas verada di bawah dan tanggung jawab Kepala Bidang Pelayanan Perijinan
- b. Kepala seksi pelayanan hewan dan ternak mempunyai tugas:
 - 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi pelayanan hewan dan ternak.
 - 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf seksi pelayanan hewan dan ternak.

12. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan program dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.

- a. Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
 - 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi bidang sarana dan prasarana.
 - 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat dan staf bidang sarana dan prasarana.
- c. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahi:
 - 1) Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - 2) Seksi Pendistribusian Benda-benda Berharga

13. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Seksi pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana.

a. Seksi pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas berada dan tanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

b. Kepala seksi bidang pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana mempunyai tugas:

1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana.

2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf seksi pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana.

14. Seksi Pendistribusian benda-benda berharga

Seksi pendistribusian benda-benda berharga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana melaksanakan pengadaan dan pendistribusian benda berharga.

15. Bidang Ketertiban

Bidang Ketertiban mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keamanan pasar.

a. Bidang Ketertiban dipimpin oleh Kepala Bidang Ketertiban yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Kepala Bidang Ketertiban mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi bidang ketertiban
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf bidang ketertiban

c. Kepala Bidang Ketertiban membawahi:

- 1) Seksi Kebersihan Pasar
- 2) Seksi Keamanan Pasar

16. Seksi Kebersihan Pasar

Seksi kebersihan pasar mempunyai tugas membantu Bidang Ketertiban dalam melaksanakan memantau dan pengadiln kebersihan.

a. Seksi kebersihan pasar dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban.

b. Kepala seksi kebersihan pasar mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi kebersihan pasar.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksanaan dan staf seksi kebersihan pasar.

17. Seksi Keamanan Pasar

Seksi keamanan pasar mempunyai tugas membantu Bidang Ketertiban dalam melaksanakan penertiban dan keamanan pasar.

a. Seksi keamanan pasar dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban.

b. Kepala seksi kebersihan pasar mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi keamanan pasar

- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf seksi keamanan pasar.

Dengan uraian tugas pokok dan fungsi di atas, diharapkan para pemangku jabatan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan citra pasar khususnya pasar tradisional menuju pasar tradisional yang bernuansa modern sehingga nantinya bisa mendongkrak pendapatan dari retribusi pasar.

b. Visi dan Misi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang

1) Visi

Visi adalah cara pandang kedepan yang di dalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi ini akan dibawa kearahnya, sehingga pada gilirannya Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dapat menjadi dinamisor dan akselerator didalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut serta karena keterkaitan dengan tugas pokok Dinas Pasar Kabupaten Lumajang seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomomr 44 tahun 2007, maka ditetapkanlah visi dari Dinas Pasar yaitu: “Terwujudnya Pasar sebagai penunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang bersih tertib dan nyaman”

Makna dari visi tersebut adalah:

1. Terwujudnya peran Dinas Pasar untuk mewujudkan pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dengan situasi yang bersih, tertib, dan nyaman

2. Pasar adalah salah satu sarana untuk menunjang perekonomian rakyat, baik itu pasar daerah maupun pasar swasta/desa.
3. Dalam bidang perekonomian, pasar berfungsi sebagai penunjang sektor perdagangan serta dalam menggerakkan perekonomian
4. Kesejahteraan dalam hal ini ada 2 sisi:
 - a. Sisi penjual dapat menjual dagangan/produknya.
 - b. Sisi pembeli dapat memnuhi kebutuhannya dengan lokasi yang terjangkau, selain itu merupakan salah satu penunjang PAD sebagai penompang pembangunan.
5. Bersih, dalam arti bahwa lokasi pasar harus bersih dari sampah dan kotoran. Sampah dan kotoran sebagai akibat limbah pasar dapat segera dibersihkan dengan disediakan TPA/TPS.
6. Tertib, dalam artian pedagang dan pembeli
7. Nyaman, merupakan suasana berbelanja.

2) Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan, oelh karenanya Dinas Pasar Kabupaten Lumajang menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana agar tercipta kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan melalui pembangunan revitalisasi pasar. Misi pertama ini bertujuan mewujudkan sarana dan prasarana pasar yang lebih bersih, tertib, aman dan nyaman. Misi ini dibidangi oleh 3 (tiga) bidang antara lain:
 - a) Bidang pelayanan perijinan

- b) Bidang ketertiban
 - c) Bidang sarana dan prasarana
2. Peningkatan pendapatan retribusi pasar melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan perdagangan. Misi kedua ini bertujuan mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar yang dibidangi oleh satu bidang yaitu bidang retribusi.

Dinas Pasar Kabupaten Lumajang menetapkan dua misi tersebut sudah mencakup semua bidang yang ada pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang. Untuk mewujudkan misi-misi tersebut Aparat Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dituntut membuat perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja sebagai penjabaran dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kabupaten Lumajang melalui berbagai kegiatan selama kurun waktu satu sampai lima tahun.



Gambar 05. Dinas Pasar Kabupaten Lumajang
Sumber: Dokumentasi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, 2016

c. **Gambaran Umum Pasar Sukodono**

1) **Sejarah Pasar Sukodono**

Keberadaan Pasar Sukodono menurut keterangan/penjelasan dari salah satu pedagang paling lama di Pasar Sukodono yaitu Hj. Supingah berdiri kurang lebih pada tahun 1950 dengan jumlah pedagang sebanyak 22 orang pedagang. Kemudian sekitar tahun 1964 dilakukan pembenahan lapak/bedak dan penataan pedagang. Selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 dilakukan pembenahan/pembangunan tahap awal yang dilaksanakan mulai bulan maret sampai dengan bulan agustus 2011 terutama pembangunan took dan kios dengan jumlah seperti berikut:

1. Jumlah toko sebanyak 25 buah
2. Jumlah kios sebanyak 24 buah

Kemudian pada tahun 2012 tepatnya mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November dilaksanakan pembangunan tahap kedua yaitu berupa:

1. Los 96 buah
2. Plesterisasi dengan ukuran 36x36 M2
3. Drainase sepanjang 200 m
4. MCK sebanyak 3 buah
5. Tempat pembuangan sampah (TPS)
6. Lampu penerangan sebanyak 24 buah
7. Lahan parkir
8. Mushola

Pada tanggal 15 Januari tahun 2013 dilakukan serah terima proyek pembangunan fasilitas pasar Sukodono dari pihak pengembang kepada Dinas

Pasar Kabupaten Lumajang. Pembangunan tersebut di atas diharapkan oleh pemerintah agar pasar tradisional Sukodono yang bernuansa modern, sehingga bisa bersaing dengan toko/pasar modern dan bisa meningkatkan pendapatan pendapatan retribusi pasar daerah.

2) Aparat Pasar Sukodono

Dalam kesehariannya, rutinitas perdagangan Pasar Sukodono tidak lepas dari peranan aparatur yang ada di dalamnya. Aparatur ini memiliki tugas dan fungsi yang beragam dari menjaga kebersihan hingga penarikan retribusi.

Aparatur kantor Pasar Sukodono terdiri dari:

Tabel 03. Jumlah Pegawai di Pasar Sukodono

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Pasar	1 Orang
2	Juru Pungut	2 Orang
3	Petugas Administrasi	1 Orang
4	Petugas Keamanan	2 Orang
5	Petugas Kebersihan	3 Orang
6	Jumlah PNS	3 Orang

Sumber: Dokumen UPT Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang, 2016

Dari table diatas menunjukkan bahwa pegawai yang ada di Pasar Sukodono berjumlah 12 Orang yang terdiri dari Kepala Pasar 1 Orang, Juru Pungut 2 Orang, Petugas Administrasi 1 Orang, Petugas Keamanan 2 Orang, Petugas Kebersihan 3 Orang, dan Pegawai Negeri Sipil 3 Orang.

3) Inventaris Pasar Sukodono

Dalam melaksanakan tugasnya, aparaturnya memerlukan prasarana yang menunjang pekerjaan mereka. Inventaris barang yang dimiliki oleh kantor Pasar Sukodono antara lain:

Tabel 04. Daftar Inventaris Barang

NO	Nama Barang	Jumlah
1	Gerobak Sampah	2 Unit
2	Armada	3 Unit
3	Meja	3 Unit
4	Kursi	3 Unit
5	Alat Pemadam	2 Unit
6	Mesin Tik	1 Unit
7	Jam Dinding	1 Unit
8	Gambar Presiden	1 Unit
9	Lambang Garuda	1 Unit

Sumber: Dokumen UPT Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang, 2016

4) Pedagang dan Lokasinya

Pedagang yang ada di Pasar Sukodono pada tahun 2013 berjumlah 150 pedagang yang terdiri dari toko, kios, los, dan PKL. Jumlah pedagang lebih banyak dibandingkan dengan sebelum adanya revitalisasi. Hal tersebut dikarenakan setelah adanya revitalisasi pedagang yang sebelumnya memiliki 2 tempat untuk berjualan sekarang hanya memiliki 1 tempat untuk 1 orang.

Tabel 05. Jumlah Pedagang dan Lokasi Berdagang

No.	Nama	Jumlah
1	Pedagang	150
2	Toko	25
3	Kios	24
4	Los	91
5	PKL	10
6	Lokasi	140
7	MCK	3 Unit
8	Mushola	1 Unit
9	TPS	1 Unit

Sumber: Dokumen UPT Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang, 2016

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.

a. Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan Pasar

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan pembangunan dapat memberika tingkat perubahan dalam struktur masyarakat terhadap kehidupan ekonomi. Usaha tersebut ditandai oleh adanya perubahan bentuk fisik sarana dan prasarana ekonomi di kehidupan masyarakat. Salah satu prasarana ekonomi tersebut adalah pasar. Hal yang perlu diperhatikan adalah pembenahan terhadap pasar yang juga aharus diperhatikan juga adalah masalah eksistensi pasar yang mengalami daya saing dengan pasar modern.

Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan revitalisasi pasar tradisional. Menurut Sansderons (1994:532) istilah revitalisasi merupakan upaya menciptakan eksistensi yang baru bagi keadaan yang ada sekarang. Revitalisasi Pasar Sukodono yang dilaksanakan pada tahun 2011-2012, merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan kesejahteraan pasar dan meningkatkan pendapatan retribusi pasar guna untuk menambah pendapatan PAD Kabupaten Lumajang. Revitalisasi yang dilakukan di Pasar Sukodono yaitu dengan mengubah seluruh bangunan pasar secara total bangunan yang berubah serta pemekaran luas. Pelaksanaan revitalisasi juga mengembalikan pentingnya Pasar Sukodono agar mampu bersaing dalam kehidupan ekonomi yang semakin modern, sehingga mampu bersaing dengan pasar modern maupun swalayan.

Dalam pelaksanaan revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperlukan pengelolaan yang jelas oleh lembaga yang melaksanakannya yaitu Dinas Pasar agar tujuan dari dilaksanakannya revitalisasi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi sebelum pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan pedagang sempat menolak dengan program revitalisasi tersebut, para pedagang beralasan jika setelah pasar direvitalisasi akan malah merugikan pedagang karena biaya sewa di pasar akan lebih besar. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga memunculkan kelompok pedagang yang pro-kontra terhadap pelaksanaan revitalisasi. Menurut Refrizal 2007:1 menyatakan :

“Perencanaan revitalisasi pasar harus transparan pada para pedagang, demi mensukseskan program revitalisasi dan mencegah munculnya golongan yang merasa dirugikan. Pada akhirnya para pedagang menyetujui pelaksanaan revitalisasi pasar sesuai kebijakan pemerintah. Pelaksanaan

revitalisasi tidak merugikan masyarakat dan pedagang yang berjualan, pembangunan tetap memprioritaskan pedangan lama.”

Pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang. Dan juga bekerja sama dengan pihak swasta/kontraktor bangunan guna untuk memperlancar proses pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pasar, jumlah pedagang yang dapat ditampung setelah pelaksanaan revitalisasi pedagang yang menempati toko, kios dan los. Dengan perincian 25 toko yang terletak diluar pasar, kios sebanyak 24 buah, dan los sebanyak 96 buah. Pasar Sukodono yang terletak di sebelah utara pusat kota Lumajang, dan juga terletak dijalan besar.

Menurut Bapak Drs. Amat selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang yang menyatakan bahwa :

“Posisi Pasar Sukodono ini sudah strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat mas. Konsep Pembangunannya sendiri kami sudah bekerja sama dengan kontraktor dan meminta bantuan agar Pasar Sukodono dibangun senyaman mungkin dengan layak walaupun keadannya tidak terlalu besar. Ya Alhamdulillah sudah jadi 80% sesuai dengan harapan. Sedangkan untuk pengelolaan secara umum, kami bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga dan mengawasi berlangsungnya kegiatan pada Pasar Sukodono. Dulu saat sebelum di revitalisasi sih gak ada pengawasan kaya gini mas, tapi sekarang sudah beda. Ini semua demi kesejahteraan bersama, kalau pedagangnya nyaman, pembelinya kan juga senang, dan dampaknya juga PAD kita bisa meningkat.” (Wawancara pada tanggal 13 September 2016 pukul 09.30 WIB)

Dengan adanya pelaksanaan revitalisasi akan menciptakan suasana yang berbeda dengan suasana pasar sebelumnya. Setelah dilaksanakan revitalisasi Pasar Sukodono terlihat bersih, tidak gelap, aman serta nyaman. Pelaksanaan revitalisasi pasar diharapkan mampu bersaing dengan pasar modern serta meningkatkan

kegiatan perekonomian Kabupaten Lumajang serta memperhatikan kesejahteraan pedagang.

Pelaksanaan revitalisasi termasuk *social development* yaitu perubahan struktur, sistem dan organisasi sosial yang diarahkan, direncanakan untuk mencapai suatu masyarakat yang menurut perencanaan akan mampu meningkatkan kemajuan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, revitalisasi Pasar Sukodono mengacu pada PAK (Program Anggaran Kerja) tahun 2011 dan tahun 2012. PAK tahun 2011 tentang revitalisasi pertokoan dan PAK tahun 2012 tentang proyek revitalisasi los. Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Widjayono, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, yaitu :

“pelaksanaan revitalisasi pasar sukodono ini sesuai dengan PAK (Program Anggaran Kerja) tahun 2011 dan tahun 2012. PAK tahun 2011 tentang revitalisasi pertokoan dan PAK tahun 2012 tentang proyek revitalisasi los mas. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pasar Kabupaten Lumajang sebagai dinas yang mempunyai kewenangan melakukan revitalisasi pasar melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan perencanaan pasar. Untuk kepengurusan revitalisasi dan pemeliharaan di Pasar Sukodono ini juga ada sendiri. Ada tim survey saat pelaksanaan revitalisasi pasar sukodono dan tim survey setelah pelaksanaan revitalisasi.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 September 2016 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasar Sukodono bukan sekedar di revitalisasi saja, namun dalam perjalanannya, Pasar Sukodono selalu dipantau dan diawasi, sehingga tujuan menciptakan pasar yang mampu meningkatkan retribusi dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli dapat terealisasi secara nyata.

Menurut Bapak Supriyono selaku Sekertaris Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, menyatakan bahwa:

“pada saat revitalisasi dan setelah Revitalisasi Pasar Sukodono ini memang dibentuk tim khusus mas, ada sekitar beberapa tim atau petugas yang memantau jalannya revitalisasi dan setelah revitalisasi. Yang membentuk tim atau petugas pelaksanaan revitalisasi itu Kepala Dinas Pasar dan Kepala Dinas Pasar menjadi ketua tim pelaksanaan revitalisasi pasar sukodono, tujuan dari dilaksanakan pemantauan setelah revitalisasi ya biar kesejahteraan pasar ini bisa permanen, bukan di awal aja gitu mas. Untuk surveinya setelah dilaksanakan revitalisasi dilakukan setiap 1 bulan sekali, kadang juga bisa lebih atau kurang. Gampangannya sih mas, tergantung kebutuhan dan tergantung intensitas kesibukan. Toh kerjaan kita ga cuma di pasar ini, tapi pasar ini merupakan kewajiban yang harus dipantau secara terus-menerus agar revitalisasi yang kita lakukan gak sia-sia.” (Wawancara pada tanggal 13 September 2016 pukul 09.30 WIB)

Hal ini juga sesuai dengan dengan hasil wawancara dari Ibu Lilik Kusminiwati S.Sos, MH selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya tata kelola kelembagaan atau kepengurusan pasar yang baik diharapkan pasar tradisional dapat memberikan kenyamanan terutama dalam hal bertransaksi, mulai dari keamanan hingga kebersihan pasar tradisional, sehingga masyarakat tidak enggan untuk berbelanja di pasar tradisional. Dengan demikian bisa meningkatkan retribusi pasar, jadi revitalisasi pasar ini benar-benar bisa diunduh manfaatnya. Dan diharapkan kedepan pasar tradisional mampu bersaing ditengah banyaknya mini market maupun swalayan modern terutama di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa menyangkut tata kelola kelembagaan pasar, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pasar mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan perencanaan pasar lewat revitalisasi pasar. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya susunan kepengurusan pada saat revitalisasi dan setelah revitalisasi Pasar Sukodono, dimana kepengurusan pasar tersebut dibentuk guna memantau keadaan pasar dan menjaga keeksistensian pasar sehingga setelah dilakukannya revitalisasi, pasar bisa memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi pemerintah, masyarakat maupun pedagang pasar sendiri. Dengan adanya tim

survei secara khusus tersebut yang dilakukan minimal 1 bulan sekali, diharapkan minat masyarakat terhadap pasar tradisional khususnya pasar Sukodono menjadi lebih besar.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan daftar nama-nama, jabatan, tugas serta kegiatan tim survei, yang diberikan kewenangan sebagai tim survei pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono:

Tabel 06. Tim Survei Revitalisasi Pasar Sukodono 2011-2012

No.	Nama	Jabatan	Tugas	Kegiatan
1.	Drs. Chodiri	Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang	Pemimpin Pelaksana Revitalisasi Pasar Sukodono	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator pelaksana revitalisasi
2.	Supriyadi	Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan prasarana	Pengawas Sarana dan Prasarana Pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kebijakan program revitalisasi dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan revitalisasi • Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar sukodono • Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian barang/benda saat revitalisasi • Mengontrol keadaan fisik dan infrastruktur pasar sukodono
3.	Muhammad Mahmud	Seksi Keamanan	Pengawas Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keamanan pasar • Melaksanakan

				<p>penertiban dan pengamanan di pasar pada saat revitalisasi dan setelah revitalisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan dan pengendalian saat proses revitalisasi berjalan
4.	Sugiyono	Sub Bagian Keuangan	Bagian keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan urusan pendanaan revitalisasi • Melaksanakan urusan keuangan dan penatausahaan administrasi keuangan dalam revitalisasi • Membuat pembukuan pengeluaran dana revitalisasi
5.	Mardiono Efendi	Seksi Perijinan	Bagian Perijinan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kebijakan program revitalisasi • Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan perijinan pemakaian pasar • Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan perijinan revitalisasi
6.	Nur Mahmudah	Seksi Pendapatan Retribusi	Bagian Retribusi Pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola pendapatan retribusi pasar • Melaksanakan pembukuan hasil pemungutan retribusi dan pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar • Melaksanakan penagihan dan

				pemantauan hasil pemungutan retribusi pasar
7.	Sanusi	Seksi Kebersihan Pasar	Bagian Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kebersihan saat revitalisasi • Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kebersihan setelah revitalisasi

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, 2016

b. Aspek Finansial

Aspek finansial atau dana adalah salah satu sumber yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Dalam hal ini, tujuan program yang telah ditetapkan dapat tercapai jika didukung dengan finansial atau dana yang memadai. Tanpa adanya dukungan finansial yang mencukupi, maka suatu kebijakan atau program tidak bisa berjalan secara efisien dan efektif. Hal ini didukung dengan hasil wawancara Bapak Teguh Widjayono selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kabupaten Lumajang yang menyatakan bahwa:

“Dana yang digunakan untuk pelaksanaan revitalisasi pasar di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang seluruhnya berasal dari APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang mas. Dana yang kita peroleh dari APBD untuk pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono sebesar kurang lebih 450 juta mas. Dan yang kita peroleh dari APBD untuk pembangunan pasar Sukodono menurut kami sudah cukup untuk pelaksanaan revitalisasi. Kita gunakan dana itu dengan sebaik mungkin agar pelaksanaan revitalisasi di pasar Sukodono bisa berjalan dengan baik dan bisa selesai tepat waktu”(Wawancara pada tanggal 13 September 2016 pukul 09.30 WIB)

Hal ini juga sesuai dengan wawancara Bapak Anshori selaku Kepala Bidang Perijinan, menyatakan bahwa:

“Dari segi finansial pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono bersumber dari APBD mas, besarnya 450 juta untuk pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono selama (tahun 2011-2012). Semuanya sudah termanajemen dengan baik, tapi untuk perinciannya sendiri mungkin agak susah ya untuk dijabarkan, karena beberapa dekade terakhir kami sering ganti kepengurusan, sehingga ibaratnya kami ini pengurus baru hanya menjalankan dari kepengurusan lama, bukan membuat susunan yang baru.” (Wawancara pada tanggal 13 September 2016 pukul 09.30 WIB)

Dana yang telah didapatkan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar kurang lebih Rp. 450 juta. Dana tersebut digunakan untuk merevitalisasi pasar Sukodono diantaranya untuk membenahi 25 toko, 24 kios, 96 los, drainase sepanjang 200 m, MCK sebanyak 3 buah, tempat pembuangan sampah (TPS) sebanyak 1 buah, lampu penerangan sebanyak 24 buah, lahan parkir dan musholla. Dalam pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono Kabupaten Lumajang, pemakaian dana tersebut telah dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.

Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara Ibu Lilik Kusminiwati, S.Sos, MH selaku Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa:

“Dana yang digunakan untuk revitalisasi pasar Sukodono ini sudah efektif dan efisien untuk memenuhi segala hal yang berkaitan dengan revitalisasi. Permasalahan utamanya ini mas ya kalau dari segi finansial setelah dilakukannya revitalisasi, yaitu kebanyakan para pedagang tidak mampu menyewa kios karena dianggap terlalu mahal, hal ini akan mempengaruhi pendapatan retribusi kita yang menurun apabila demikian, sehingga akan dicarikan jalan keluar. Salah satu jalan keluarnya adalah pihak pasar bekerja sama dengan bank BRI melalui program kur BRI untuk permodalan para pedagang di pasar Sukodono.” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016 pukul 09.00 WIB)

Menyangkut perihal tentang pinjaman modal untuk para pedagang Pasar Sukodono lebih lanjut di jelaskan oleh Bapak Agung Pribadi S.AP selaku Mantan Kepala Pasar Sukodono menyatakan:

“pelaksanaan revitalisasi pasar sukodono kan dilaksanakan pada tahun 2011-2012 dan selesai tahun 2013 mas. Setelah berjalan selama setahun pihak bank BRI melihat besarnya perputaran arus uang yang ada di pasar Sukodono, sehingga setelah itu bank BRI berani bekerja sama dengan pasar sukodono melalui program kur BRI untuk permodalan para pedagang. Untuk syarat para pedagang meminjam modal yang pertama dengan Surat Ijin Pedagang/Surat Ijin Kepemilikan dan yang kedua adanya rekom dari Kepala Pasar Sukodono bahwa mereka benar-benar memiliki usaha disitu. Kalau pasar pedagang tidak memiliki usaha disitu tidak bisa pinjam mas. Untuk platformnya sendiri pihak BRI melihat dari bentuk bangunan, jadi kalau pemilik toko bisa meminjam sebesar Rp. 40-50 juta, kios Rp. 25-30 juta sedangkan los 10-20 juta. Pinjaman tersebut berjangka 3 tahun jika para pedagang meminjam mulai tahun 2014 makan akan berakhir tahun 2017. Para pedagang membayar cicilan setiap 1 bulan sekali selama 3 tahun. Tetapi untuk masalah besarnya berapa para pedagang membayar cicilan tiap bualn saya kurang begitu tahu mas soalnya perinciannya ada di pihak BRI.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono Kabupaten Lumajang dana yang diperoleh ini untuk mendukung revitalisasi ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 450 juta. Dari paparan diatas diungkapkan juga untuk masalah permodalan pegadang, pihak Pasar Sukodono bekerja sama dengan Bank BRI melalui program kur BRI. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada para pedagang untuk modal usaha mereka. Selain itu perubahan manajemen pasar semi modern juga dilakukan agar pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern oleh pedagang Pasar Sukodono. Revitalisasi Pasar Sukodono ini benar-benar membawa perubahan dalam berbagai segi, sala satunya manajemen pengelolaannya yang mengacu pada SOP tertulis, bukan lagi seperti pasar tradisional yang asal menempati dan membuang sampah seenaknya. Dengan demikian, manajemen finansial di Pasar Sukodono benar-benar tertata dengan baik, dan berjalannya kegiatan di Pasar Sukodono akan efektif.

Berikut adalah data ketentuan untuk pinjaman modal pedagang Pasar Sukodono:

Tabel 07. Modal Pinjaman Pedagang Pasar Sukodono

No	Bangunan/Kategori	Jumlah	Jangka Waktu
1.	Toko	Rp. 40.000.000 – 50.000.000	3 Tahun
2.	Kios	Rp. 25.000.000 – 30.000.000	3 tahun
3.	Los	Rp 10.000.000 – 20.000.000	3 Tahun

Sumber: Data Arsip Pasar Sukodono, 2016

c. Aspek Distribusi dan Kontrol Kualitas Barang

Seperti yang kita ketahui distribusi merupakan penyaluran barang-barang produksi kepada konsumen. Pasar tradisional memiliki hubungan yang sangat erat dengan kegiatan distribusi. Dimana pasar tradisional merupakan sarana untuk kegiatan distribusi. Hal ini sesuai dengan fungsi dari pasar tradisional, yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen, sebagai tempat yang paling strategis untuk memperjual-belikan barang-barang hasil produksi kepada konsumen, dan sarana terjadinya interaksi antara penjual dengan pembeli dalam melakukan jual beli. Akan tetapi, dari hasil penelitian RICA (*Rural Investment Climate Assessment*) pada 2005 bahwa ditemukan kualitas barang yang dipasokkan ke pasar tradisional bermutu rendah atau bahkan limbah dari pasar modern yang reject. Keadaan tersebut dikarenakan sampai saat ini kontrol kualitas barang di pasar tradisioanal tidak pernah di programkan.

Masalah ini bisa saja berimbas terhadap sepinya pasar tradisional karena para konsumen kurang percaya pada barang-barang yang dijual di pasar

tradisional. Seperti yang di ungkapkan ibu rumah tangga bernama Ibu Sri Rejeki, mengatakan:

“saya sih sebenarnya suka berbelanja di pasar tradisional mas, tapi kalau lihat berita-berita di televisi kayak tahu diformalin, ayam tiren bumbu jadi dikasih pewarna dan banyak barang yang kedaluarsa masih dijual. Saya jadi ragu berbelanja di pasar tradisional, soalnya kan bisa jadi penyakit itu mbak. Murah sih murah tapi kalau sudah jadi penyakit kan obatnya yang mahal.”(wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2016, pukul 09.30 WIB)

Untuk itu pemerintah harus mengadakan pengawasan atau kontrol kualitas barang yang ada di pasar tradisional. Hal tersebut bertujuan agar para konsumen tidak lagi takut berbelanja di pasar tradisional. Seperti yang kita tahu, berita-berita mengenai kecurangan pedagang menjadikan masyarakat berfikir dua kali untuk berbelanja di pasar tradisional.

Hal serupa juga terjadi di Pasar Sukodono, menyangkut permasalahan kontrol kualitas barang memang tidak pernah di programkan, namun dari pihak Dinas Pasar Kabupaten Lumajang beserta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pernah memeriksa barang dagangan yang dijual di Pasar Sukodono. Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Pasar Sukodono, yakni Bapak Satori:

“Setelah adanya revitalisasi di pasar sukodono tidak pernah secara resmi ada sistem kontrol kualitas barang mas, maksudnya kontrol kualitas barang disini yaitu adanya pengawasan barang yang dijual dipasar misalnya barang kedaluarsa atau barang yang tidak layak untuk dijual. Namun dari Dinas Pasar dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pernah sesekali mengecek barang yang dijual disini. Hingga akhirnya kegiatan tersebut dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh orang dari Dinas Pasar dan BPOM. Dinas Pasar berpendapat bahwa hal tersebut perlu dilakukannya untuk menjaga kualitas barang yang ada di Pasar Sukodono.”(Wawancara pada tanggal 15 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Anshori selaku Kepala Bidang Perijinan Dinas Pasar:

“Setelah dilakukan revitalisasi di pasar Sukodono kami beserta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengecekan barang setiap 1 bulan sekali yang bertujuan supaya barang yang dijual di pasar benar-benar aman untuk dikonsumsi pembeli. Walaupun program ini tidak diprogramkan secara resmi tetapi kami merasa hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kualitas barang yang ada di seluruh pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lumajang.”(Wawancara pada tanggal 14 September 2016 pukul 10.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa setelah adanya revitalisasi di Pasar Sukodono kontrol kualitas barang tidak pernah di programkan secara resmi, namun dari pihak Dinas Pasar Kabupaten Lumajang beserta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengecekan sendiri di Pasar Sukodono guna untuk memastikan barang-barang yang dijual di Pasar Sukodono layak untuk dikonsumsi. Mengingat banyak ditemukan kualitas barang yang dipasokan ke pasar tradisional bermutu rendah atau bahkan limbah dari pasar modern yang reject. Hingga akhirnya pengawasan tersebut dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Dengan adanya kontrol kualitas barang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang lewat Dinas Pasar dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut diharapkan masyarakat percaya dengan barang-barang yang dijual di pasar tradisional. Kontrol kualitas barang memang perlu dilakukan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, namun alangkah baiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang memberi sanksi yang tegas terhadap pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan, sanksi yang diberlakukan juga untuk kebaikan pedagang sendiri.

d. **Apek Perbaikan Sarana Fisik dan Infrastruktur**

Dalam revitalisasi Pasar Sukodono, sarana fisik dan infrastuktur merupakan titik yang paling penting untuk melihat perubahan revitalisasi dari segi fisik. Oleh karenanya, kedua hal tersebut harus benar-benar diperhatikan secara berkala, bukan hanya di awal saja. Sebelum melaksanakan proses revitalisasi bangunan pasar, terlebih dahulu harus mengetahui kondisi eksisting bangunan pasar dengan melakukan tes kontruksi atau uji kelayakan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan agar dapat menentukan konsep pembangunan tersebut. Kegiatan penilaian dan analisa terhadap pembangunan yang meliputi aspek teknis, finansial, ekonomi, sosial dan lingkungan termasuk pelaksanaan analisis penegelolaan bangunan sehingga dapat dikelola secara berkesinambungan dan tetap memberi kn manfaat finansial. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Drs. Amat selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, menyatakan:

“dalam tahap pelaksanaan revitalisasi pasar sukodono, kami menunjuk dan mendapatkan rekomendasi dari CV Sidoarjo mengenai uji kelayakan bangunan Pasar Sukodono untuk penggunaan 10 tahun selanjutnya mas. Dari hasil uji kelayakan bangunan tersebut, kondisi eksisting Pasar Sukodono sudah tidak layak lagi terutama pada kondisi fisik dan infrastruktur bangunan. Sehingga konsep revitalisasi Pasar Sukodono adalah perbaikan pada segi fisik pasar atau arsitektur, perbaikan infrastruktur dan penambahan fasilitas umum. Perbaikan tampak pasar sukodono yang sesuai dengan kondisi sekitar: adanya perubahan tampak muka pasar, perubahan tampak samping pasar, dan penambahan tempat usaha. Konsep desain revitalisasi tersebut tentunya terlebih dahulu kami sosialisasikan kepada para pedagang.”(Wawancara pada tanggal 15 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Pernyataan tersebut didukung dengan penjelasan Bapak Sugiarto selaku

Badan Pengawas Pasar Sukodono, menyatakan:

“kondisi bangunan pasar direncanakan untuk memenuhi kebutuhan 10 tahun kedepan mas, sehingga desain struktur sipil dan aspek estetika dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang dan melakukan tindakan pencegahan pencemaran air, udara dan lingkungan. Kami juga meminta kepada pihak

kontraktor untuk menambahkan zona ATM mas, untuk memudahkan para pembeli jika sewaktu-waktu membutuhkan uang secara mendadak.”
.”(Wawancara pada tanggal 16 September 2016 pukul 11.00 WIB)



Gambar 06. Pasar Sukodono Bagian Luar

Sumber: Dokumentasi bagian luar Pasar Sukodono, 2016

Pada saat pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono, pedagang tidak dipindahkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan mengenai perbaikan pada infrastruktur pasar, para pedagang juga memberi beberapa masukan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Suwati selaku pedagang di Pasar Sukodono, menyatakan:

“kami selaku para pedagang disini memberikan beberapa masukan terkait pelaksanaan revitalisasi pasar sukodono ini mas. Kami meminta perbaikan di bagian infrastruktur pasar, misalnya membenahan drainase, lantai di plester, penambahan lampu penerangan. Dengan begitu akan memudahkan kami untuk berjualan dan menambah minat pembeli karena kalau hujan air tidak lagi masuk dan tidak akan becek lagi didalam pasar karena tanahnya sudah di plester. Setelah proses revitalisasi selesai, Alhamdulillah kami disini merasa puas, aspirasi para pedagang selalu ditanggapi dan di realisasikan. Perbaikan infrastrukturnya dilaksanakan dengan baik.”
.”(Wawancara pada tanggal 18 September 2016 pukul 08.00.00 WIB)



Gambar 07. Bagian dalam Pasar Sukodono di Keramik

Sumber: Dokumentasi Pasar Sukodono, 2016

Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono Dinas Pasar Kabupaten Lumajang telah membentuk tim yang khusus untuk mengecek keadaan sarana dan infrastruktur yang ada pada Pasar Sukodono. Tujuannya yakni untuk melihat dan

memantau keadaan serta kelayakan sarana dan infrastruktur apakah bisa dimanfaatkan dengan baik atau membutuhkan perbaikan agar bisa digunakan manfaatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Pasar Sukodono, yakni Bapak Satori:

“Perbaikan sarana dan prasarana itu ada sendiri di bagian tim survei mas, walaupun demikian ya semua juga ikut membantu untuk menjaga pasar sukodono setelah dilakukan revitalisasi. Kami menerima segala keluhan yang masuk apabila ada sarana dan infrastruktur yang butuh mengalami perbaikan setelah revitalisasi mas.” (Wawancara pada tanggal 13 September 2016 pukul 09.30 WIB)

Hal tersebut juga di dukung dengan pernyataan dari Bapak Agung Pribadi S.AP selaku Mantan Kepala Pasar Sukodono menyatakan bahwa:

“Kalau yang namanya revitalisasi kan pasti tidak pernah lepas dari segi fisik bangunan mas, di pasar Sukodono sendiri yang direvitalisasi dari segi fisik antara lain 25 toko, 24 kios, 96 los, drainase sepanjang 200 m, MCK sebanyak 3 buah, tempat pembuangan sampah (TPS) sebanyak 1 buah, lahan parkir dan musholla. Dalam pelaksanaan revitalisasi kenapa ada pembenahan tambahan seperti MCK, tempat pembuangan sampah (TPS) dan lampu penerangan, karena menurut kami seperti MCK misalnya, ya tau sendiri namanya kamar mandi umum selalu saja ada ga beresnya kan mas. Misalnya saja ada tangan jail yang mencoret-coret tembok dan pintu. Selain itu yakni tempat pembuangan sampah (TPS) yang harus diperbanyak di beberapa titik supaya pasar bisa terlihat lebih bersih karena sampah tidak berserakan, lampu penerangan yang harus selalu di cek apakah masih berfungsi atau tidak dan untuk musholla sendiri agar para penjual dan pembeli mudah untuk melakukan ibadah karena musholanya sudah lebih baik. Memang sih ada tim surveinya sendiri untuk ngecek pasar sukodono namun ya kami semua tetap bekerja sama satu sama lain, termasuk dengan pedagang juga agar membantu merawat fasilitas yang telah diberikan.” (Wawancara pada tanggal 15 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Selain itu juga ada pendapat dari Staf Bagian Administrasi Pasar Sukodono, yakni Bapak Bumin Akhmadi:

“Kalau dari segi sarana fisik kan sudah jelas ya mas, ada pembenahan pada 25 toko, 24 kios, 96 los, drainase sepanjang 200 m, MCK sebanyak 3 buah, tempat pembuangan sampah (TPS) sebanyak 1 buah, lahan parkir dan musholla. Kalau dari segi infrastruktur agar bisa bersaing dengan pasar modern, yaitu memperbaiki jalan didalam/disekitar Pasar Sukodono untuk memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Membenahi sarana

listrik agar tidak terjadi konsleting arus listrik yang dapat menyebabkan kebakaran. Dan juga mempermudah akses mobil pemadam kebakaran agar supaya sewaktu-waktu ada kebakaran bisa segera teratasi.”(Wawancara pada tanggal 18 September 2016 pukul 10.00 WIB)



Gambar 08. Toko Pasar Sukodono Setelah di Revitalisasi
Sumber: Dokumentasi Pasar Sukodono, 2016



Gambar 09. Kios Pasar Sukodono Setelah di Revitalisasi
Sumber: Dokumentasi Pasar Sukodono, 2016



Gambar 10. Los Pasar Sukodono Setelah di Revitalisasi

Sumber: Dokumentasi Pasar Sukodono, 2016

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dalam revitalisasi Pasar Sukodono, sarana fisik dan infrastruktur merupakan titik yang paling penting untuk melihat perubahan revitalisasi dari segi fisik. Sebelum melaksanakan proses revitalisasi bangunan pasar, terlebih dahulu harus mengetahui kondisi eksisting bangunan pasar dengan melakukan tes konstruksi atau uji kelayakan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan agar dapat menentukan konsep pembangunan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pasar dalam tahap pelaksanaan revitalisasi pasar sukodono, menunjuk dan mendapatkan rekomendasi dari CV Sidoarjo mengenai uji kelayakan bangunan Pasar Sukodono.

Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono terdapat beberapa sarana fisik dan infrastruktur yang di benahi, diantaranya 25 toko, 24 kios, 96 los, drainase sepanjang 200 m, MCK sebanyak 3 buah, tempat pembuangan sampah (TPS) sebanyak 1 buah, lahan parkir dan musholla. Dan juga adanya penambahan fasilitas umum seperti tempat untuk ATM. Setelah adanya revitalisasi di Pasar

Sukodono ada tim survei khusus yang bekerja sama dengan keseluruhan pihak Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dan juga para pedagang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keeksistensian revitalisasi pasar yang sudah terlaksana agar tidak kembali tenggelam dan rusak karena dianggap tidak layak dan tidak memenuhi standar revitalisasi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang

Dalam suatu program atau gagasan, pasti terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang. Begitu juga dengan revitalisasi pasar tradisional ini akan berjalan lancar bila dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa faktor penunjang yang dapat mempermudah dengan berbagai manfaat yang diperoleh baik dari segi produk, sarana dan manusia sebagai subjek sekaligus objek. Tetapi hal tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari adanya faktor-faktor penghambat, yang menjadi permasalahan dan kendala permasalahan dan kendala pelaksanaan revitalisasi. Sehingga dua komponen ini menjadi hal penting dalam revitalisasi pasar tradisional untuk dianalisis dengan baik agar dapat menjadi wacana bagi semua pihak dengan permasalahan yang selama ini ada, yaitu dengan mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada, dan meningkatkan beberapa faktor yang dapat mendukung pelaksanaan revitalisasi tersebut.

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan Revitalisasi Pasar Sukodono tidak pernah lepas dari dukungan dan hambatan yang dihadapi. Ada beberapa hal penting yang menjadi faktor pendukung dalam proses pembangunannya. Adapun faktor pendukung

dalam revitalisasi Pasar Sukodono adalah sumber daya anggaran dan sarana dan prasarana.

1) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran atau dana yang mencukupi merupakan salah satu hal penunjang keberhasilan suatu program yang sedang dilaksanakan. Sebaliknya, tanpa adanya dukungan sumber daya anggaran atau dana yang mencukupi maka kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif. Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono, pentingnya sumber daya anggaran atau dana juga didukung dengan hasil wawancara Bapak Teguh Widjayono selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kabupaten Lumajang yang menyatakan:

“Kebutuhan dana yang diperlukan untuk revitalisasi pasar Sukodono ini cukup besar, tapi untungnya pemerintah daerah memberikan dana yang mencukupi sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. karena seperti yang kita tahu mas dana kan memang salah satu faktor utama kelancaran suatu program. Tanpa adanya dan yang mencukupi pastilah program itu tidak akan berjalan dengan lancar. Sumber dana untuk mendukung revitalisasi ini secara keseluruhan diperoleh dari APBD.”(Wawancara pada tanggal 13 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Lilik Kusminiwati, S.Sos, MH selaku Mantan Kepala Bidang Distribusi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa:

“Dana yang di dapatkan dari APBD berjumlah sekitar kurang lebih 450 juta. Dana itu sangat mendukung sekali dalam pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono karena dana tersebut cukup untuk memenuhi segala sesuatu kebutuhan terkait pembangunan ini mas. Kami gunakan dana itu dengan sebaik dan seefektif mungkin sehingga dana tersebut istilahnya tepat sasaran pelaksanaan pembangunan revitalisasi pasar sukodono. Kami disini bekerja dengan se objektif mungkin agar pelaksanaan pembangunan revitalisasi pasar sukodono bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu.”(Wawancara pada tanggal 14 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sumber daya anggaran atau dana yang diperoleh Dinas Pasar Kabupaten Lumajang untuk revitalisasi Pasar Sukodono dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah turut mendukung pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono. Dana yang didapatkan Dinas Pasar untuk revitalisasi Pasar Sukodono kurang lebih berjumlah Rp. 450.000.000. dengan jumlah dana yang mencukupi tersebut, Dinas Pasar Kabupaten Lumajang mengelolanya dengan sebaik mungkin. Sehingga segala kebutuhan yang berkaitan dengan revitalisasi Pasar Sukodono dapat terpenuhi.

2) Lokasi

Selain sumber daya anggaran atau dana, faktor pendukung lainnya dalam proses pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono adalah lokasi. Dimana lokasi disini berkaitan dengan letak Pasar Sukodono yang berada di jalan raya sehingga memudahkan proses pelaksanaan revitalisasi, karena memiliki akses jalan yang mudah. Terutama Pasar Sukodono yang memiliki letak yang sangat strategis yaitu terletak di jalan jurusan probolinggo dan jember, sehingga memberikan kemudahan dalam pendistribusian barang. Seperti yang kita ketahui lokasi yang strategis merupakan salah satu ukuran yang dapat dipakai sebagai penunjang untuk mencapai tujuan dan sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kegiatan agar lebih mudah. Maka dari itu lokasi yang strategis akan memudahkan proses pelaksanaan suatu program. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Agung Pribadi S.AP selaku Mantan Kepala Pasar Sukodono Kabupaten Luamajang, beliau menyatakan sebagai berikut:

“lokasi juga sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan revitalisasi di pasar sukodono ini mas, pasar sukodono memiliki letak yang strategis yaitu berada di jalur menuju probolinggo dan jember. Hal tersebut otomatis memberikan dampak yang positif kepada pasar sukodono, karena memiliki

akses yang sangat mudah dalam pendistribusian barang-barang yang digunakan untuk revitalisasi pasar. (Wawancara pada tanggal 19 September 2016 pukul 10.00 WIB)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Teguh Widjayono selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kabupaten Lumajang menyatakan:

“Salah satu faktor pendorong revitalisasi pasar Sukodono adalah lokasi pasar Sukodono mas. lokasi sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan revitalisasi di pasar sukodono ini, pasar sukodono memiliki letak yang strategis yaitu berada di jalur menuju probolinggo dan jember. Kenapa saya bilang lokasi di pasar Sukodono mendorong cepat terselesainya pembangunan, karena salah satu contoh akses jalan ke pasar Sukodono sangat mudah untuk truk material untuk mengirim barang.”(Wawancara pada tanggal 14 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Yang sangat strategis memberikan keuntungan yang sangat banyak, karena terletak di jalur menuju Probolinggo dan Jember. Sehingga memudahkan proses pengangkutan bahan material dan pendistribusian barang yang lain. Jadi dengan letak Pasar Sukodono seperti demikian maka pelaksanaan pembangunan Pasar Sukodono akan cepat terselesaikan.

Sekertaris Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, yakni Bapak Supriyono juga menyatakan:

“Jalan untuk menuju pasar Sukodono sangat mudah untuk dijangkau mas karena pasar sukodono terletak di jalan umum sehingga untuk truk pengangkut material atau alat berat mudah untuk mengaksesnya. Dan juga lahan di sekitar pasar Sukodono lumayan luas.”(Wawancara pada tanggal 19 September 2016 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa lokasi yang strategis akan menunjang suatu kegiatan berjalan dengan mudah. Jika lokasi ditempat tersebut kurang strategis maka akan menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan. Lokasi Pasar Sukodono memang sangat strategis berada di jalur akses Probolinggo dan Jember. Akses yang mudah dijangkau oleh truk muatan

material atau alat berat, sehingga tidak akan mengalami kendala untuk akses menuju Pasar Sukodono.

b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono Kabupaten Lumajang tidak serta merta berjalan dengan mulus. Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya berasal dari pihak pedagang yang kurang setuju dengan adanya revitalisasi. Dan juga dari pihak ketiga pelaksana revitalisasi yaitu kontraktor, sulitnya mencari pihak ketiga menjadi hambatan dalam pelaksanaan revitalisasi.

1) Sumber Daya Manusia

Terkait dengan faktor penghambat yang dihadapi dengan adanya upaya revitalisasi pasar tradisional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang adalah merupakan hal yang wajar. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap kebijakan atau program pasti terdapat pro dan kontra. Hambatan tersebut dialami oleh pedagang yang akan menempati Pasar Sukodono apabila telah di revitalisasi. Para pedagang beralasan tidak mampuan untuk membayar tarif sewa untuk kios dan lapak karena apabila tarif sewa dinaikkan akan menimbulkan kerugian bagi pedagang. Menurut Bapak Teguh Widjayono selaku Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Dinas Pasar Kabupaten Lumajang menyatakan:

“Mendengar akan diadakannya revitalisasi di Pasar Sukodono para pedagang kurang setuju dengan hal tersebut. Para pedagang beranggapan setelah adanya revitalisasi makan tarif sewa lapak akan naik sehingga akan mempengaruhi pendapatan mereka. Menurut para pedagang kalau tarif sewa naik pendapatan mereka tidak akan maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait akan

diadakannya revitalisasi di Pasar Sukodono.”(Wawancara pada tanggal 13 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Kepala Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang, Bapak Agung Pribadi S.AP menyatakan:

“Pedagang beranggapan jika pasar di revitalisasi maka pendapatan mereka akan berkurang. Para pedagang beranggapan setelah adanya revitalisasi makan tarif sewa lapak akan naik sehingga akan mempengaruhi pendapatan mereka. Menurut para pedagang kalau tarif sewa naik pendapatan mereka tidak akan maksimal.Kita dulu sempat memberikan sosialisai kepada para pedagang mengenai program revitalisasi ini tetapi masih saja banyak pedagang yang kurang setuju. ”(Wawancara pada tanggal 19 September 2016 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa para pedagang menjadi salah satu penghambat jalannya revitalisasi pasar Sukodono Kabupaten Lumajang. Mereka beralasan jika pasar di revitalisasi maka pendapatan mereka akan berkurang disebabkan harga sewa lebih meningkat. Dan pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi lebih mendalam agar para pedagang lebih paham dengan program revitalisasi. Agar para pedagang tidak menghambat proses jalannya revitalisasi di Pasar Sukodono.

2) **Kerja Sama dengan Pihak Ketiga**

Dalam pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono bukan hanya dari pihak Pemerintah Daerah dan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang saja yang terlibat tetapi ada juga pihak ketiga yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Kerja sama dengan pihak ketiga diperlukan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan Pasar Sukodono dan efektivitas pengelolaan pasar. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud adalah kontraktor. Sulitnya mencari kontraktor untuk menjadi menjalankan pembangunan menjadi salah satu faktor penghambat revitalisasi.

Menurut Bapak Teguh Widjayono selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kabupaten Lumajang menyatakan:

“Salah satu faktor penghambat revitalisasi pasar Sukodono adalah pihak ketiganya atau kontraktor mas. Karena kami harus mencari kontraktor yang cocok untuk bisa kami percaya merevitalisasi pasar Sukodono. Kami tidak mau asal-asalan menunjuk pihak ketiga atau kontraktor. Kalau kita sekedar asal-asalan untuk memilih kontraktor bisa-bisa proses pembangunan pasar sukodono makin lama. Maka dari itu kita harus benar-benar selektif dalam memilih siapa kontraktor yang akan menangani pelaksanaan pembangunan di pasar sukodono. Dalam pencarian pihak ketiga pun kita sempat mengalami kendala, kendalanya yaitu kita dipaksa harus secepatnya menemukan kontraktor untuk membangun pasar sukodono tetapi disini lain kita juga kesulitan mencarinya.”(Wawancara pada tanggal 14 September 2016 pukul 11.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perijinan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, yakni Bapak Anshori menyatakan:

“Kami sempat kesulitan mencari kontraktor yang tepat untuk menjalankan pembangunan pasar Sukodono mas. Kami mau dapat kontraktor yang tepat karena biasanya kalo tidak tepat pengerjaannya bisa molor. Kami tidak mau nantinya disalahkan jika terjadi apa-apa dengan pambanunan pasar sukodono. Maka dari itu kita sangat selektif dalam memilih pihak ketiga untuk menangani pelaksanaan pembangunan pasar sukodono. Soalnya saya mengerti banyak kasus pembangunan yang selesainya tidak tepat waktu karena disebabkan kurang tepatnya penanganan di suatu pembangunan tersebut.”(Wawancara pada tanggal 15 September 2016 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sulitnya mencari pihak ketiga atau kontraktor yang tepat merupakan suatu hambatan revitalisasi pasar Sukodono. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang beserta Dinas Pasar Kabupaten Lumajang harus cerdas dalam memilih pihak ketiga atau kontraktor sebagai pelaksana pembangunan revitalisasi Pasar Sukodono.

Adapun ruang lingkup pekerjaan setelah menemukan pihak ketiga, yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian pelaksanaan pembangunan, yaitu meliputi Tahap Perencanaan dan Tahap Perijinan, Tahap Pelaksanaan Proyek, dan Tahap Pemberitahuan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan Proyek.

3) Kebijakan

Kebijakan merupakan proses yang tidak sederhana dan merupakan proses yang begitu kompleks. Dengan begitu kompleksnya, dalam sebuah implementasi kebijakan tidak akan pernah lepas dari sebuah permasalahan. Kebijakan sendiri harus sejalan dengan program yang ada dalam program revitalisasi, karena apabila sebuah kebijakan bertolak belakang dengan program akan terjadi suatu kepincangan dalam proses pelaksanaan program. Di Kabupaten Lumajang mendapati kendala tersebut dalam pelaksanaannya yaitu karena kebijakan tentang pembatasan pasar modern tidak berjalan sesuai harapan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Anshori selaku Kepala Bidang Perijinan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang yaitu:

“permasalahan tentang ketimpangan pasar tradisional dan pasar modern ini bukan hanya soal terhambatnya pembangunan pasar tradisional saja mas, namun dikarenakan kebijakan tentang pembatasan jumlah pasar modern yang kurang berjalan sesuai dengan ekspektasi. Hal tersebut berdampak pada semakin tergerusnya pasar tradisional oleh pasar modern dikarenakan semakin maraknya pembangunan pasar modern yang ada di Kabupaten Lumajang ini.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 18 januari 2017 pukul 10.00 WIB)

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Agung Pribadi S.AP selaku

Mantan Kepala Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang menyatakan:

“menyangkut tentang kebijakan pembatasan pasar modern menurut saya pemerintah Kabupaten Lumajang harus lebih tegas dalam menangani permasalahan ini mas. Karena kalau tetap seperti ini maka keberadaan pasar tradisional akan semakin mengkhawatirkan. Dan juga akan berdampak kepada masyarakat terutama para pedagang pasar tradisional. Kebijakan harus pro rakyat jangan hanya mementingkan kepentingan pihak asing saja.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 07.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa lemahnya kebijakan yang mengatur jumlah pasar modern di Kabupaten Lumajang menjadi

permasalahan semakin tersisihkannya pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang harus lebih tegas dalam menerapkan isi dari kebijakan tersebut. Karena jika dibiarkan begitu saja maka keberadaan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lumajang akan semakin mengkhawatirkan.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.

a. Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan Pasar

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan pembangunan dapat memberikan tingkat perubahan dalam struktur masyarakat terhadap kehidupan ekonomi. Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan revitalisasi pasar tradisional. Menurut Sansderons (1994:532) istilah revitalisasi merupakan upaya menciptakan eksistensi yang baru bagi keadaan yang ada sekarang. Dalam pelaksanaan revitalisasi harus memperhatikan beberapa konsep, salah satunya adalah aspek tata kelola dan kelembagaan pasar. Hal ini sesuai dengan pemahaman konsep revitalisasi dalam aspek tata kelola dan kelembagaan yang dimaksud Rizal (2013:5-7) yang menyatakan bahwa:

Tata kelola pasar tradisional yang buruk menjadi hambatan revitalisasi dan berpotensi memandulkan program perbaikan fisik pasar. Aspek tata kelola ini harus menentukan kedinasan mana yang bertanggung jawab dalam program revitalisasi pasar tradisional dan kedinasan tersebut harus melakukan koordinasi yang kuat dengan instansi, kedinasan yang lainnya atau pihak penyedia jasa finansial dalam pelaksanaannya. Serta harus ditentukan parameter-parameter pengukur keberhasilan kinerjanya. Jangan

sampai ada duplikasi program antar instansi atau antar kedinasan perihal program revitalisasi ini.

Berdasarkan teori tersebut maka sesuai dengan data yang diperoleh bahwasanya pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Dinas Pasar. Dan juga bekerja sama dengan pihak swasta/kontraktor bangunan guna untuk memperlancar proses pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono.

Dalam pelaksanaan program revitalisasi di pasar Sukodono tidak akan berhasil tanpa adanya peran dari *local government* atau pemerintah daerah. Dalam penelitian ini kelembagaan pasar merupakan sebagai aktor pelaksana program revitalisasi di Pasar Sukodono. Hal ini sejalan dengan teori pemerintah daerah menurut Bhenyamin Hoessein (2001) sebagaimana dikutip oleh Nurcholis (2010:1.25) menjelaskan bahwa *local government* dapat mengandung tiga arti. Pertama, *local government* berarti pemerintah lokal. Kedua, *local government* berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Ketiga, *local government* berarti daerah otonom. Dari ketiga arti *local government* diatas, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) *Local government* dalam arti pertama menunjuk pada lembaga atau organnya. Maksudnya *local government* adalah organ atau badan atau organisasi pemerintah di tingkat daerah. Dengan kata lain, *local government* adalah wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah.
- 2) *Local government* dalam arti kedua menunjuk pada fungsi atau kegiatannya. Dalam arti ini, *local government* sama dengan Pemerintahan Daerah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Istilah *local government* sering digunakan untuk fungsi pembentukan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat atau birokrat lokal.

- 3) *Local government* dalam arti ketiga yaitu sebagai sebagai daerah otonom. Dalam pengertian ini *local government* memiliki otonomi (lokal) dalam arti *self government*, yaitu mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Dalam istilah administrasi publik masing-masing wewenang tersebut sering disebut sebagai wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*).

Maka dari penjabaran teori di atas aspek tata kelola dan kelembagaan sesuai dalam artian yang ketiga yaitu mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal revitalisasi pasar tradisional di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang. Sementara itu, menurut Mulyadi (2010:7) menjelaskan bahwa pengelolaan pasar tradisional yang ideal adalah dengan membagi ke dalam dua sisi yaitu dari segi fisik yang ditinjau dari segi aspek bangunan dan infrastruktur, dan non fisik ditinjau dari aspek manajemen pengelolaan pasar. Berikut segi non fisik ditinjau dari manajemen:

- 1) Perlu memikirkan kepentingan-kepentingan pedagang dan pengunjung pasar.
- 2) Manajemen pengelolaan harus transparan dan profesional dengan memperhatikan prinsip *good corporate governane*.
- 3) Pengelolaan pasar harus memiliki wawasan yang luas kemampuan berfikir secara holistik serta visi dan misi yang jelas.
- 4) Perlu kemampuan untuk menyusun peraturan tata letak pasar (layout). Pengelolaan memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan institusi pasar.
- 5) Perlu adanya sanksi yang tegas atas penunggakan retribusi
- 6) Pedagang perlu mengkhususkan diri untuk menjual satu jenis barang dagangan sesuai dengan zoning komoditas.
- 7) Perlu ada standar mutu barang yang diperdagangkan.
- 8) Terdapat sistem informasi harga barang pasokan dan kemampuan negosiasi dengan pemasok
- 9) Pedagang memberikan harga yang lebih transparan kepada konsumen, penempatan dagangan harus rapi, tertib, aman dan tidak boleh melebihi batas tempat dagangan.
- 10) Masyarakat harus diikut sertakan dalam pengelolaan pasar
- 11) Semua pedagang harus punya SHP (Surat Hak Penempatan) dan KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pedagang)

- 12) Implementasi peraturan lokasi pasar modern yang supaya tidak mematikan pasar tradisional.
- 13) Perlu ada pembatasan komoditi bagi pasar modern khususnya komoditi basah.
- 14) Perlu mengatur waktu operasi yang jelas bagi pasar modern sehingga mematikan pasar tradisional.
- 15) Pembinaan terhadap dinas dan pengelola oleh pemerintah pusat, dan perlu pembinaan terhadap pedagang oleh kantor dinas pemerintah kota secara periodik
- 16) Perlu tersosialisasinya program bantuan kredit bagi pedagang kecil melalui program kemitraan UKM (Usaha Kecil Menengah) baik melalui pemerintah atau lembaga keuangan lainnya.
- 17) Konsistensi atau harmonisasi kebijakan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemetintah kota/kabupaten

Dari beberapa poin teori diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang memiliki wewenang untuk mengatur manajemen pengelolaan Pasar Sukodono. Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan manajemen pengelolaan Pasar Sukodono seperti yang terdapan pada poin teori tersebut.

Revitalisasi pasar tradisional sangat penting bagi kelangsungan pasar tradisional itu sendiri, mengingat semakin banyaknya pasar modern yang ada saat ini membuat pasar tradisional semakin menurun popularitasnya. Dengan adanya aspek tata kelola dan kelembagaan yang jelas dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pasar maka diharapkan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Sukodono bisa berjalan secara efektif dan efisien. Peran Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Dinas Pasar tidak hanya berhenti di pelaksanaan revitalisasi pasar saja, tetapi kedepannya harus melakukan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Sukodono kedepannya setelah di revitalisasi. Hal tersebut bertujuan agar pasar-pasar tradisional di Kabupaten Lumajang khususnya Pasar Sukodono dapat bersaing dengan pasar modern.

b. Aspek Finansial

Aspek finansial atau dana adalah salah satu sumber yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Dalam program revitalisasi pasar tradisional yang dilaksanakan di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang, jika di dalam pelaksanaannya tanpa didukung oleh dana yang mencukupi maka maka program tersebut kemungkinan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan revitalisasi pasar di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang seluruhnya berasal dari APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (2007:100) yang mengemukakan bahwa sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana yang diperlukan untuk membiayahi operasional pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pendapat dari Widodo tersebut sesuai dengan kebijakan atau program revitalisasi pasar tradisional yang dilaksanakan di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.

Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono aspek finansial tidak hanya menyangkut tentang dana revitalisasi tetapi juga membahas tentang permodalan untuk para pedagang pasar. Permodalan para pedagang adalah merupakan bentuk program dari pihak Pasar Sukodono untuk memberikan modal pinjaman yang diberikan kepada para pedagang. Hal ini sesuai dengan teori tentang aspek finansial yang di maksud oleh Rizal (2013:5-7) yang menyatakan bahwa Penguatan permodalan pada para pedagang, seperti akses terhadap jasa keuangan serta skema pembiayaannya. Ini jangan hanya dijadikan program di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan agar para pedagang yang sebagian dari kalangan

menengah ke bawah bisa meningkatkan permodalannya. Berdasarkan teori tersebut, pihak Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang telah memberikan pinjaman kepada para pedagang terkait masalah modal usaha. Modal usaha yang diberikan Pasar Sukodono untuk para pedagang berasal dari kerjasama antara Bank BRI dengan Pasar Sukodono.

Pasar Sukodono dalam melaksanakan program ini, mendapat dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sumber dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana Pasar Sukodono. Dana yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jumlahnya cukup besar sekitar kurang lebih Rp. 450.000.000 dan digunakan seefektif mungkin untuk membangun sarana dan prasarana pasar Sukodono Kabupaten Lumajang. Selain itu aspek finansial berupa permodalan para pedagang juga dilakukan oleh pihak Pasar Sukodono guna untuk memberikan modal usaha bagi para pedagang di pasar. Pedagang mendapatkan pinjaman modal tersebut dengan syarat yang pertama ada Surat Ijin Pedagang/Surat Ijin Kepemilikan dan yang kedua adanya rekom dari Kepala Pasar Sukodono bahwa mereka benar-benar memiliki usaha disitu. Dana pinjaman yang diperoleh para pedagang merupakan bentuk kerja sama antara Pasar Sukodono dan Bank BRI. Untuk platformnya sendiri pihak BRI melihat dari bentuk bangunan, jadi kalau pemilik toko bisa meminjam sebesar Rp. 40-50 juta, kios Rp. 25-30 juta sedangkan los 10-20 juta. Pinjaman tersebut berjangka 3 tahun jika para pedagang meminjam mulai tahun 2014 makan akan berakhir tahun 2017. Para pedagang membayar cicilan setiap 1 bulan sekali selama 3 tahun.

c. **Aspek Distribusi dan Kontrol Kualitas Barang**

Seperti yang kita ketahui distribusi merupakan penyaluran barang-barang produksi kepada konsumen. Pasar tradisional memiliki hubungan yang sangat erat dengan kegiatan distribusi. Dimana pasar tradisional merupakan sarana untuk kegiatan distribusi. Hal ini sesuai dengan fungsi dari pasar tradisional, yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen, sebagai tempat yang paling strategis untuk memperjual-belikan barang-barang hasil produksi kepada konsumen, dan sarana terjadinya interaksi antara penjual dengan pembeli dalam melakukan jual beli. Tetapi menyangkut soal kontrol kualitas barang di pasar sampai saat ini belum pernah di programkan. Hal tersebut sesuai dengan teori aspek distribusi dan kontrol kualitas barang menurut Rizal (2013:5-7) menyatakan bahwa Aspek distribusi dan kontrol kualitas barang yang sampai saat ini tidak pernah diprogramkan. Dari hasil penelitian RICA (Rural Investment Climate Assesment) pata tahun 2005 bahwa ditemukan kualitas barang yang dipasokan ke pasar tradisional bermutu rendah atau bahkan limbah dari pasar modern yang rijek. Berdasarkan teori tersebut, sebelum adanya revitalisasi di Pasar Sukodono memang tidak pernah dilakukan kontrol kualitas barang karena baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak pernah di programkan.

Dinas Pasar Kabupaten Lumajang melihat permasalahan kualitas barang yang sering bermasalah di pasar tradisional akhirnya memberikan usulan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Dinas Pasar beranggapan jika kontrol kualitas barang di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Lumajang memang harus diprogramkan atau paling tidak dilakukan percobaan dulu sebelum akhirnya di

programkan. Maksud dari kontrol kualitas barang adalah adanya pengawasan barang yang dijual dipasar misalnya barang reject atau barang yang tidak layak untuk dijual. Hal tersebut bertujuan agar barang yang dijual di pasar lebih sehat dan berkualitas, agar mampu bersaing dengan pasar modern. Hal ini sejalan dengan teori model pengelolaan pasar tradisional menurut Mulyadi (2010:7) menyatakan bahwa model pengelolaan pasar tradisional yang ideal adalah dengan membagi ke dalam dua sisi yaitu dari segi fisik yang ditinjau dari segi aspek bangunan dan infrastruktur, dan non fisik ditinjau dari aspek manajemen pengelolaan pasar. Berikut segi non fisik ditinjau dari manajemen:

- 1) Perlu memikirkan kepentingan-kepentingan pedagang dan pengunjung pasar.
- 2) Manajemen pengelolaan harus transparan dan profesional dengan memperhatikan prinsip *good corporate governane*.
- 3) Pengelolaan pasar harus memiliki wawasan yang luas kemampuan berfikir secara holistik serta visi dan misi yang jelas.
- 4) Perlu kemampuan untuk menyusun peraturan tata letak pasar (layout). Pengelolaan memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan institusi pasar.
- 5) Perlu adanya sanksi yang tegas atas penunggakan retribusi
- 6) Pedagang perlu mengkhususkan diri untuk menjual satu jenis barang dagangan sesuai dengan zoning komoditas.
- 7) Perlu ada standar mutu barang yang diperdagangkan.
- 8) Terdapat sistem informasi harga barang pasokan dan kemampuan negosiasi dengan pemasok
- 9) Pedagang memberikan harga yang lebih transparan kepada konsumen, penempatan dagangan harus rapi, tertib, aman dan tidak boleh melebihi batas tempat dagangan.
- 10) Masyarakat harus diikut sertakan dalam pengelolaan pasar
- 11) Semua pedagang harus punya SHP (Surat Hak Penempatan) dan KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pedagang)
- 12) Implementasi peraturan lokasi pasar modern yang supaya tidak mematikan pasar tradisional.
- 13) Perlu ada pembatasan komoditi bagi pasar modern khususnya komoditi basah.
- 14) Perlu mengatur waktu operasi yang jelas bagi pasar modern sehingga mematikan pasar tradisional.

- 15) Pembinaan terhadap dinas dan pengelola oleh pemerintah pusat, dan perlu pembinaan terhadap pedagang oleh kantor dinas pemerintah kota secara periodik
- 16) Perlu tersosialisasinya program bantuan kredit bagi pedagang kecil melalui program kemitraan UKM (Usaha Kecil Menengah) baik melalui pemerintah atau lembaga keuangan lainnya.
- 17) Konsistensi atau harmonisasi kebijakan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah kota/kabupaten.

Berdasarkan dari beberapa poin teori diatas, maka poin ke satu, tujuh dan lima belas yang sesuai dengan temuan lapangan. Isi poin tersebut adalah perlu memikirkan kepentingan-kepentingan pedagang dan pengunjung pasar, perlu ada standart mutu barang yang diperdagangkan dan pembinaan terhadap dinas dan pengelola oleh Pemerintah Pusat, dan perlu pembinaan terhadap pedagang oleh Kantor Dinas Pemerintah Kota secara periodik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang menyetujui usulan dari Dinas Pasar untuk melakukan percobaan kontrol kualitas barang yang ada di Pasar Sukodono. Walaupun belum diprogramkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang kontrol kualitas barang di pasar tradisional, Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Dinas Pasar berharap kasus yang sering terjadi di pasar-pasar tradisional tentang barang reject dan tidak layak jual tidak terjadi di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Lumajang khususnya di Pasar Sukodono tidak terjadi karena sudah melakukan pengontrolan barang. Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah memberikan wewenang kepada Dinas Pasar untuk mengontrol barang yang ada di pasar Sukodono. Dinas Pasar Kabupaten Lumajang sendiri melaksanakan tugas tersebut dengan di bantu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengontrolan barang dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh pegawai Dinas Pasar dan Badan Pengawas Obat dan Makan

(BPOM). Indikator kualitas barang harus sangat diperhatikan oleh pihak Dinas Pasar dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Harus ada kriteria-kriteria barang apa saja atau seperti apa saja yang boleh dan tidak boleh di jual di jual di Pasar Sukodono. Misalnya barang kedaluarsa, barang reject dari pasar modern, barang mengandung formalin, barang mengandung pewarna buatan yang sangat membahayakan bagi para konsumen.

d. Aspek Perbaikan Sarana Fisik dan Infrastruktur

Dalam revitalisasi Pasar Sukodono, sarana fisik dan infrastuktur merupakan titik yang paling penting untuk melihat perubahan revitalisasi dari segi fisik. Oleh karenanya, kedua hal tersebut harus benar-benar diperhatikan secara berkala, bukan hanya di awal saja. Sebelum melaksanakan proses revitalisasi bangunan pasar, terlebih dahulu harus mengetahui kondisi eksisting bangunan pasar dengan melakukan tes kontruksi atau uji kelayakan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan agar dapat menentukan konsep pembangunan tersebut.

Kegiatan penilaian dan analisa terhadap pembangunan yang meliputi aspek teknis, finansial dan lingkungan termasuk pelaksanaan penegelolaan bangunan sehingga dapat dikelola secara berkesinambungan agar sesuai dengan kebutuhan konsumen dan nantinya fisik bangunan dan infrastruktur yang bagus sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Hal ini sesuai dengan teori konsep pengelolaan dan revitalisasi pasar tradisional yang dimaksud oleh Mulyadi (2010:7) menyatakan bahwa model pengelolaan pasar tradisional yang ideal adalah dengan membagi ke dalam dua sisi yaitu dari segi fisik yang ditinjau dari segi aspek bangunan dan infrastruktur, dan non fisik ditinjau dari aspek

manajemen pengelolaan pasar. Berikut segi fisik dilihat dari aspek bangunan dan aspek infrastruktur:

- 1) Aspek bangunan yaitu renovasi bangunan sesuai dengan kebutuhan konsumen, konstruksi bangunan menggunakan bahan yang tahan lama, arsitektur bangunan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya, serta pemeliharaan pasar secara berkala.
- 2) Aspek infrastruktur yaitu meliputi aspek diantaranya adalah:
 - a) Pembuatan maupun perbaikan terhadap saluran air bersih yang dapat dipergunakan oleh pedagang atau pengunjung dan perbaikan saluran air kotor agar lancar.
 - b) Perbaikan sistem drainase yang baik dan memadai, perbaikan dan pemisahan akses jalan yang dilalui oleh pejalan kaki dan akses kendaraan.
 - c) Pemisahan arus sirkulasi barang dengan pengunjung yang baik keluar maupun yang masuk
 - d) Perbaikan dan pengadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti ATM, P3K, toilet dan tempat ibadah yang memadai.
 - e) Tersedianya tempat parkir yang memadai dan aman.
 - f) Perlu pengaturan sistem zoning berdasarkan barang yang dijual, dan perlu ada pemisahan antara komoditi basah dan kering.
 - g) Perlu adanya papan petunjuk arah zoning yang menjadi panduan bagi pengunjung.
 - h) Perlu ada tempat penampungan sampah yang memadai sesuai kapasitas yang dibutuhkan.
 - i) Perlu ada fasilitas bongkar muat yang memadai.

Sementara itu, menurut teori konsep revitalisasi pasar tradisional menurut Rizal (2013:5-7) menyatakan bahwa perbaikan sarana fisik dan infrastruktur pasar yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam program revitalisasi pasar. Namun perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat saat pembangunannya sangat sekali perlu ditingkatkan agar nantinya fisik bangunan dan infrastruktur yang bagus bisa digunakan dalam jangka panjang dan tidak mubazhir. Berdasarkan kedua teori di atas, dapat disimpulkan bahwa perbaikan sarana fisik dan infrastruktur menjadi perhatian utama pemerintah dalam pelaksanaan revitalisasi. Perencanaan dan pelaksanaannya harus matang dan diawasi ketat, kontur bangunan pasar pun harus sesuai dengan kebutuhan konsumen, arsitektur bangunan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya, serta

pemeliharaan pasar secara berkala. Agar nantinya fisik bangunan dan infrastruktur pasar bisa digunakan dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono, Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Dinas Pasar telah memperbaiki sarana fisik dan infrastruktur. Dari segi fisik diantaranya ada 25 toko, 24 kios, 96 los, drainase sepanjang 200 m, MCK sebanyak 3 buah, tempat pembuangan sampah (TPS) sebanyak 1 buah, lampu penerangan sebanyak 24 buah, dan perbaikan musholla. Sedangkan dari segi infrastruktur adanya perbaikan tempat parkir lebih diperluas, jalan didalam dan diluar sekitar pasar sudah di paving/di plester, dan pembuatan jalan khusus untuk truk bongkar muat. Perbaikan Pasar Sukodono lewat revitalisasi harus dipantau terus oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Dinas Pasar agar pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien. Namun tidak berhenti disitu saja, Pemerintah Kabupaten Lumajang harus tetap mengontrol dan mengawasi Pasar Sukodono supaya bangunan yang telah direvitalisasi bisa terjaga dengan baik dan berguna dalam jangka panjang. Selain itu, kenyamanan para pedagang dan pembeli harus juga diutamakan. Dengan demikian maka minat pembeli untuk berbelanja di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang akan lebih meningkat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang

Dalam sebuah program tidak akan pernah lepas dari 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya. Kedua faktor tersebut adalah faktor pendukung dan penghambat. Begitu pula dengan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat

yang dapat membuat keberhasilan dan kegagalan dari program tersebut. Faktor-faktor pendukung dan penghambat adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Untuk dapat mencapai suatu kebijakan/program, tentu ada beberapa hal yang ikut mendukung. Hal tersebut biasa disebut dengan faktor pendukung. Adapun faktor pendukung dari revitalisasi pasar tradisional di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang diantaranya adalah sumber daya anggaran dan yang kedua sarana dan prasarana.

1) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang juga harus di siapkan dengan matang dalam melaksanakan suatu program. Ketersediaan anggaran yang optimal akan berdampak pada pelaksanaan program yang lancar. Program akan menjadi sia-sia jika anggaran tidak tersedia. Walaupun perencanaannya matang, organisasi pelaksana program sudah ditetapkan akan tetapi sumber daya anggaran tidak tersedia, maka program juga tidak akan bisa berjalan. Ketersediaan anggaran yang pasti selama mulai program sampai dengan selesainya program merupakan syarat yang harus dipenuhi jika ingin suatu program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hal ini seiring dengan dengan pendapat menurut Indiahono (2009:48) yang menjelaskan bahwa selain didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, setiap kebijakan harus didukung pula oleh sumber daya finansial. Sementara itu, menurut George Edward III dalam Subarsono (2005:91) menjelaskan bahwa implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementator tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud

sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Berdasarkan kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan untuk menjamin keberhasilan dalam suatu program sangat diperlukan juga sumber daya finansial. Tanpa ada dukungan finansial atau dana yang memadai, program tidak bisa berjalan efektif dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa revitalisasi pasar tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang mendapat dukungan finansial atau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dana yang diperoleh berjumlah kurang lebih sekitar Rp. 450.000.000 dan kemudian digunakan untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan terkait dengan program tersebut agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. sehingga, dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial atau dana yang diperoleh pasar Sukodono Kabupaten Lumajang dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mendukung program revitalisasi Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.

2) Lokasi

Seperti yang kita ketahui lokasi yang strategis merupakan salah satu ukuran yang dapat dipakai sebagai penunjang untuk mencapai tujuan dan sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kegiatan agar lebih mudah. Maka dari itu lokasi yang strategis akan memudahkan proses pelaksanaan suatu program. Menurut Winarno (2004:126) menyatakan bahwa sumber-sumber mendukung pelaksanaan kebijakan atau program meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

Berdasarkan pernyataan diatas, yang di maksud dengan fasilitas adalah lokasi. Dengan adanya sumber-sumber penting yang mendukung seperti lokasi yang strategis maka pelaksanaan program akan cepat terselesaikan. Karena lokasi merupakan salah kunci utama suatu program berjalan dengan baik dan lancar.

Dari hasil penelitian di lapangan, dimana lokasi Pasar Sukodono yang berada di jalan raya sehingga memudahkan proses pelaksanaan revitalisasi, karena memiliki akses jalan yang mudah. Terutama Pasar Sukodono yang memiliki letak yang sangat strategis yaitu terletak di jalan jurusan probolinggo dan jember, sehingga memberikan kemudahan dalam pendistribusian barang. Selain itu, Pasar Sukodono yang mendukung pelaksanaan program revitalisasi diantaranya adalah jalan menuju pasar Sukodono mudah dilalui sehingga memudahkan mobil pengangkut barang bangunan menuju lokasi. Selain itu, lokasi disekitar pasar Sukodono cukup luas sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Penghambat

Salain faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang tetapi, di dalam pelaksanaan program masih terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat. Faktor penghambat pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang diantaranya adalah sumber daya manusia dan kontraktor atau pihak ketiga.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang patut menjadi perhatian khusus dalam suatu pelaksanaan program. Kurangnya dukungan dari sumber daya

manusia merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan sebuah pelaksanaan program. mengingat sumber daya manusia adalah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang adalah para pedagang. Menurut Soenarko (2000:185) menyatakan bahwa kegagalan pelaksanaan program maupun kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa masalah, masalah-masalah yang dimaksud antara lain:

- a) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan reformulasi terhadap kebijakan tersebut.
- b) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- c) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d) Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
- e) Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern
- f) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis
- g) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumber daya manusia)

Pernyataan soenarko diatas, menyatakan bahwa terdapat 7 poin yang menjadi kendala dalam suatu pelaksanaan program. Hambatan dukungan sumber daya manusia yang terjadi dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang jika dihubungkan dengan teori soenarko, maka terdapat di poin ke 7 yakni adanya kekurangan akan tersediannya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumber daya manusia). Dari pendapat soenarko, terlihat jelas bahwa kurangnya dukungan dari sumber daya manusia merupakan hambatan suatu program. Adanya dukungan dari sumber daya manusia memegang perananan penting bagi keberhasilan program.

Dalam pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono Kabupaten Lumajang sebelum dilaksanakan revitalisasi para pedagang banyak yang menolak untuk

direvitalisasi. Para pedagang beralasan jika nanti setelah direvitalisasi maka sewa tempat dipasar akan lebih mahal dan malah akan merugikan mereka. Alasan itulah yang menyebabkan permasalahan sebelum dilakukannya revitalisasi di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang.

2) Pihak Ketiga atau Kontraktor

Sebelum dilaksanakan revitalisasi pasar tradisional di pasar Sukodono Kabupaten Lumajang, Dinas Pasar Kabupaten Lumajang selaku pelaksana program harus bekerjasama dengan pihak lain atau bisa disebut dengan kontraktor. Karena pembangunan pasar Sukodono Kabupaten Lumajang membutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk menyelesaikan program tersebut. Menurut Tangkilisan (2005:86) dalam Manajemen Publik, memandang kerjasama perlu diadakan dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Kerja sama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Dengan adanya kerjasama, akan mencitpatakan sebuah semangat untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama dengan pihak lain menunjang kelancaran suatu program. Karena akan mempermudah suatu program terlaksana. Terlebih lagi jika para pelaksana mendapat pihak ketiga yang sesuai dengan yang diharapkan maka akan mendorong keefektifan program.

Dari hasil penelitian di lapangan, Dinas Pasar masih kesulitan dalam mencari pihak ketiga atau kontraktor untuk bekerjasama. Hal ini bukan tanpa

alasan, mengingat dalam pencarian pihak ketiga atau kontraktor Dinas Pasar Kabupaten Lumajang harus benar-benar pintar untuk memilih pihak ketiga atau kontraktor. Jika tidak pintar-pintar memilih pihak ketiga maka pengerjaan pasar Sukodono Kabupaten Lumajang akan molor dari target dan akan merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang karena akan menyita waktu dan menambah anggaran.

3) Kebijakan

Kebijakan merupakan proses yang tidak sederhana dan merupakan proses yang begitu kompleks. Dengan begitu kompleksnya, dalam sebuah implementasi kebijakan tidak akan pernah lepas dari sebuah permasalahan. Kebijakan sendiri harus sejalan dengan program yang ada dalam program revitalisasi, karena apabila sebuah kebijakan bertolak belakang dengan program akan terjadi suatu kepincangan dalam proses pelaksanaan program. Menurut Soenarko (2000:185) menyatakan bahwa kegagalan pelaksanaan program maupun kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa masalah, masalah-masalah yang dimaksud antara lain:

- a) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan reformulasi terhadap kebijakan tersebut.
- b) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- c) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d) Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
- e) Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern
- f) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis
- g) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumber daya manusia)

Pernyataan Soenarko diatas, menyatakan bahwa terdapat 7 poin yang menjadi kendala dalam suatu pelaksanaan program. Hambatan dukungan sumber daya manusia yang terjadi dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di

pasar Sukodono Kabupaten Lumajang jika dihubungkan dengan teori soenarko, maka terdapat di poin ke 4 yakni isi dari kebijakan bersifat samar-samar. Dari pendapat Soenarko, terlihat jelas bahwa kurangnya penerapan yang tegas terkait kebijakan pembatasan jumlah pasar modern yang ada di Kabupaten Lumajang.

Dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan pasar modern yang ada di Lumajang nampaknya kurang berjalan dengan baik. Terbukti dengan semakin banyaknya pasar modern yang ada di Kabupaten Lumajang ini jelas membuktikan bahwa kurang berjalannya kebijakan tersebut dengan baik. Hal tersebut yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang jika tidak ingin pasar tradisional yang ada tidak semakin terpinggirkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan tentang pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan apa yang telah dikaji dari penyajian data serta pembahasan yaitu:

1. Aspek tata kelola dan kelembagaan pasar

Dalam pelaksanaan revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperlukan pengelolaan yang jelas oleh lembaga yang melaksanakannya, agar tujuan dari dilaksanakannya revitalisasi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Menyangkut tata kelola kelembagaan pasar pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pasar mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan perencanaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya susunan kepengurusan pada saat revitalisasi dan setelah revitalisasi Pasar Sukodono, dimana kepengurusan pasar tersebut dibentuk guna memantau keadaan pasar dan menjaga keeksistensian pasar sehingga setelah dilakukannya revitalisasi, pasar bisa memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi pemerintah, masyarakat maupun pedagang pasar sendiri. Dengan demikian diharapkan minat masyarakat terhadap pasar tradisional di Kabupaten Lumajang khususnya pasar Sukodono menjadi lebih besar.

Karena dengan di revitalisasinya Pasar Sukodono, akan lebih nyaman, bersih dan aman.

2. Aspek finansial

Dalam pelaksanaan revitalisasi pasar Sukodono Kabupaten Lumajang dana yang diperoleh ini untuk mendukung revitalisasi ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 450 juta. Dana tersebut digunakan untuk membangun 25 toko, 24 kios, 96 los, drainase sepanjang 200 m, MCK sebanyak 3 buah, tempat pembuangan sampah (TPS) sebanyak 1 buah, lampu penerangan sebanyak 24 buah, tempat parkir dan musholla. Selain menyangkut dana soal revitalisasi Pasar Sukodono aspek finansial juga membahas tentang masalah permodalan pedagang, pihak Pasar Sukodono bekerja sama dengan Bank BRI melalui program kur BRI. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada para pedagang untuk modal usaha mereka. Selain itu perubahan manajemen pasar semi modern juga dilakukan agar pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern oleh pedagang Pasar Sukodono. Revitalisasi Pasar Sukodono ini benar-benar membawa perubahan dalam berbagai segi, salah satunya manajemen pengelolaannya yang mengacu pada SOP tertulis, bukan lagi seperti pasar tradisional yang asal menempati dan membuang sampah seenaknya. Dengan demikian, manajemen finansial di Pasar Sukodono benar-benar tertata dengan baik, dan berjalannya kegiatan di Pasar Sukodono akan efektif.

3. Aspek distribusi dan kontrol kualitas barang

Setelah adanya revitalisasi di Pasar Sukodono kontrol kualitas barang tidak pernah di programkan secara resmi, namun dari pihak Dinas Pasar Kabupaten

Lumajang beserta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengecekan sendiri di Pasar Sukodono guna untuk memastikan barang-barang yang dijual di Pasar Sukodono layak untuk dikonsumsi. Mengingat banyak ditemukan kualitas barang yang dipasok ke pasar tradisional bermutu rendah atau bahkan limbah dari pasar modern yang reject. Hingga akhirnya pengawasan tersebut dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Dengan adanya kontrol kualitas barang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang lewat Dinas Pasar dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut diharapkan masyarakat percaya dengan barang-barang yang dijual di pasar tradisional.

4. Aspek sarana perbaikan sarana fisik dan infrastruktur

Dalam revitalisasi Pasar Sukodono, sarana fisik dan infrastruktur merupakan titik yang paling penting untuk melihat perubahan revitalisasi dari segi fisik. Sebelum melaksanakan proses revitalisasi bangunan pasar, terlebih dahulu harus mengetahui kondisi eksisting bangunan pasar dengan melakukan tes konstruksi atau uji kelayakan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan agar dapat menentukan konsep pembangunan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pasar dalam tahap pelaksanaan revitalisasi pasar sukodono, menunjuk dan mendapatkan rekomendasi dari CV Sidoarjo mengenai uji kelayakan bangunan Pasar Sukodono. Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Sukodono terdapat beberapa sarana fisik dan infrastruktur yang di benahi, diantaranya 25 toko, 24 kios, 96 los, drainase sepanjang 200 m, MCK sebanyak 3 buah, tempat pembuangan sampah (TPS) sebanyak 1 buah, lahan parkir dan musholla. Dan juga adanya penambahan fasilitas umum seperti

tempat untuk ATM. Setelah adanya revitalisasi di Pasar Sukodono ada tim survey khusus yang bekerja sama dengan keseluruhan pihak Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dan juga para pedagang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keeksistensian revitalisasi pasar yang sudah terlaksana agar tidak kembali tenggelam dan rusak karena dianggap tidak layak dan tidak memenuhi standar revitalisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan adanya masalah dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Sukodono Kabupaten Lumajang, penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan dalam evaluasi pelaksanaan revitalisasi tersebut. Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. Mengenai sempitnya lahan parkir di Pasar Sukodono khususnya parkir kendaraan roda empat atau lebih, Pemerintah Kabupaten Lumajang harus segera membangun lahan parkir baru yang lebih luas untuk Pasar Sukodono. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang harus segera mencari lahan untuk tempat parkir tersebut.
2. Mengenai aspek distribusi dan kontrol kualitas barang di pasar tradisional yang sampai saat ini belum di programkan, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang harus segera membuat program tersebut, supaya kasus-kasus yang sering terjadi di pasar-pasar tradisional tidak terjadi juga di Pasar Sukodono. Misalnya makanan diberi pengawet formalin, banyak barang rijek dari pasar modern, beras plastik dan masih banyak yang lain.
3. Pengembangan pasar tradisional harus lebih memperhatikan aspek kelangsungan usaha bagi pedagang yang sebelumnya menempati pasar. Oleh karena itu, penting

di pertimbangkan mengenai kemampuan ekonomi pedagang. Revitalisasi pasar bukan berarti pembangunan fisik yang megah saja melainkan fasilitas yang dianggap penting bagi konsumen, yaitu: kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan terjaganya kualitas barang yang ada di pasar.

4. Mengenai masalah retribusi bulanan pedagang yang sering tidak membayar sesuai tagihan, seharusnya pihak Pasar Sukodono memberikan sanksi yang tegas untuk para pedagang yang “nakal”. Hal tersebut bertujuan supaya pendapatan retribusi Pasar Sukodono tidak terus-menerus kurang dari target.



DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Penerbit alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bima, Aria. 2007. *Pasar Modern Versus Revitalisasi Pasar Tradisional*. (online), (<http://suaramerdeka.com/harian.html>, diakses 17 maret 2016)
- Bowo, Fauzi. 2007. *Wagub DKI: Revitalisasi Pasar Tradisional Mutlak Dilakukan*, (online), (<http://jaktim.beritajakarta.com/beritadetail.asp.html>)
- Danisworo. 2002. *Pengertian Revitalisasi*, (online)
<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009.03/definifi-revitalisasi.html>
diakses 30 Maret 2016
- Freddy, Rangkuti. 2007. *Manajemen Persediaan Aplikasi di Bidang Bisnis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik : Model, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Inu, Kencana Syafii dkk, 1999. *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Jhingan, ML. 1998. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Pajawali Pers
- Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Krisnamurthi, Bayu. 2006. *Penanggulangan dan Pengurangan Kemiskinan dalam 22 Tahun Studi Pembangunan Pengurangan Kemiskinan, Pembangunan Agribisnis dan Revitalisasi Pertanian*. LPPM IPB. Bogor.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga*. Sage Publications: Inc.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Offset.
- Muluk, Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media

- Mulyadi. 2010. *Model Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Prespektif Kemandirian Daerah Surakarta*. STIE AUB Surakarta
- Nurcholis, Hanif. 2010. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Rizal, T. K. 2013. *Regulasi Pasar Modern dan Pasar Tradisional dalam Persaingan Usaha*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Sadilah, E. Dkk. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta
- Sanderson, S. K. 1993. *Sosilogi Makro*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siagian, P Sondang. (2005). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sitepu, R. K. 2010. *Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Ekonomi Regional*. QE Journal, 01(01): 1-17
- Soenarko. 2000. Public Policy. *Pengertian untuk menganalisa kebijakan pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sudarman, A. 1992. *Teori Ekonomi Mikro*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta
- Suprayitno, E. 2008. *Ekonomi Mikro Prespektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press
- Tjokroamidjojo, B. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Winardi. 1992. *Ekonomi Makro (Aspek-Aspek: Pengusaha, Badan Usaha, Perusahaan)*. Bandung: Mandar Maju

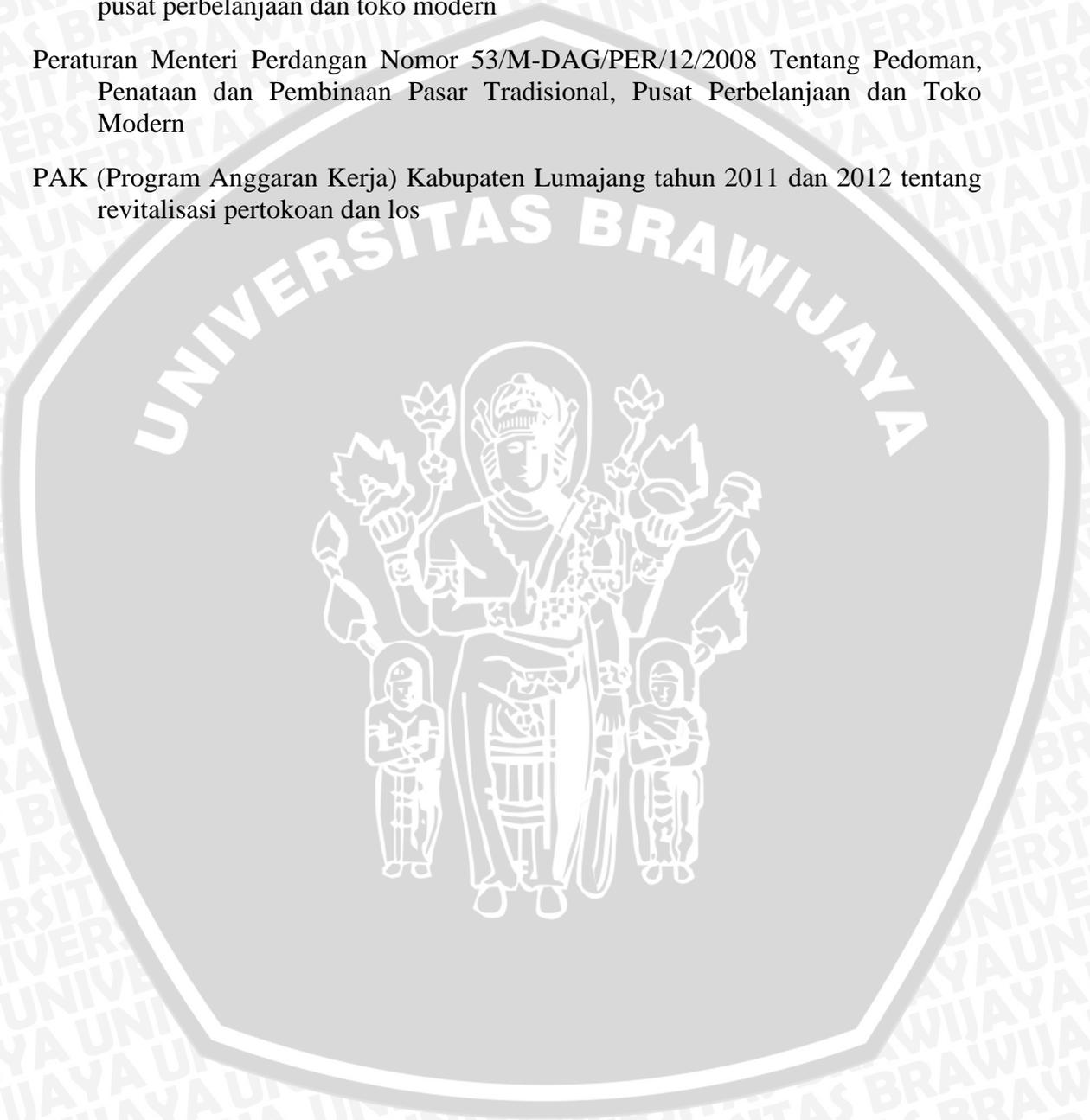
Sumber lain

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Perpres 112 pasal 15 Tahun 2007, tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

PAK (Program Anggaran Kerja) Kabupaten Lumajang tahun 2011 dan 2012 tentang revitalisasi pertokoan dan los



Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan : Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id
LUMAJANG - 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN

Nomor : 072/1160/427.63/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Menimbang : Surat Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Nomor : /UN.10.3/PG/2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Permohonan Ijin Survey atas nama CHOIRUL ANAM

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : CHOIRUL ANAM
2. Alamat : Desa Mojo Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan :

1. Judul Proposal : Upaya Pemerintah Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional
2. Tujuan : Ijin Penelitian
3. Bidang Penelitian : -
4. Penanggung jawab: Choirul Saleh, Dr.,M.Si
5. Anggota/Peserta :
6. Waktu Penelitian : Agustus – September
7. Lokasi Penelitian : Dinas Pasar Kabupaten Lumajang

- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan ;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan ;
 4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 4 Agustus 2016

a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK



Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Lumajang (sebagai laporan).
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang.
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang.
4. Sdr. Ka. Dinas Pasar Kabupaten Lumajang.
5. Sdr. Dekan Universitas Brawijaya.

Lampiran 3. Lembar Disposisi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PASAR
LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari	: <i>Kabupaten Wiset Tax</i>	Diterima Tanggal	: <i>16/08/2016</i>
Tanggal Surat	: <i>15/08/2016</i>	Nomor Agenda	: <i>675</i>
Nomor Surat	: <i>10792/UN.10.3/16/2016</i>		
Perihal	: <i>Ret/Survey</i>	① Sekretaris; 2. Bidang Retribusi; 3. Bidang Pelayanan Perijinan, 4. Bidang Sarana dan Prasarana; 5. Bidang Ketertiban.	

INTRUKSI / INFORMASI :

16/8/16
Edo Galuh
Beritahu yang
perkait dan
bertu.

Kepes
15/8/16

ISI DISPOSISI :

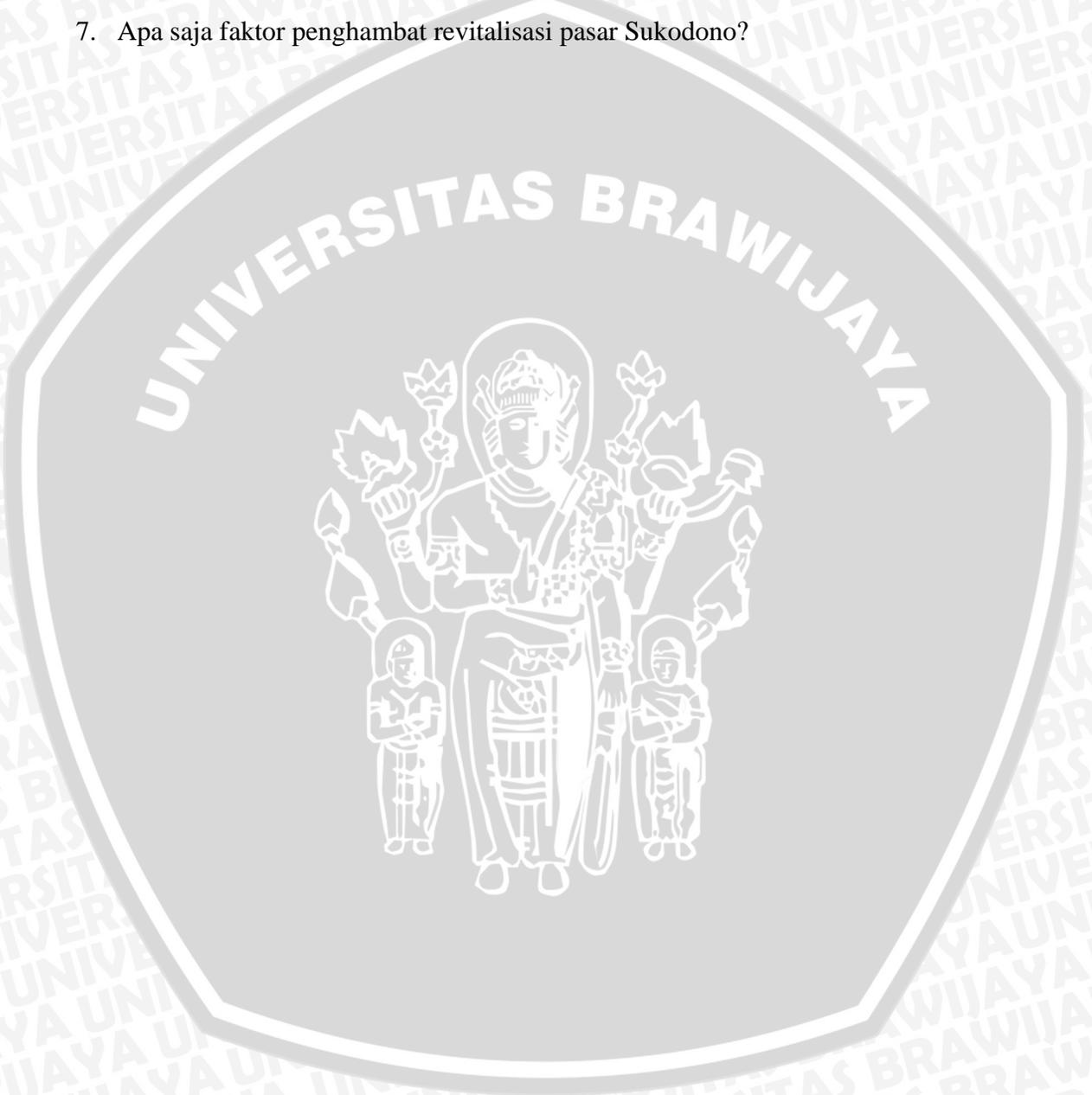
Tunjukkan ke Pasan
Suhodono, untuk
di bantu selanjutnya
16/8/16

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

1. Standart dan Tujuan Kebijakan
 - a. PERDA nomor berapa yang mengatur tentang revitalisasi pasar di Kabupaten Lumajang?
 - b. Apa saja sasaran dari kebijakan revitalisasi pasar tersebut?
2. Aspek tata kelola dan kelembagaan pasar
 - a. Bagaimana aspek tata kelola dan kelembagaan pasar sebelum dan setelah revitalisasi?
 - b. Siapa saja pihak dalam tata kelola dan kelembagaan pasar di Pasar Sukodono?
 - c. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam aspek tata kelola dan kelembagaan pasar?
 - d. Apakah pihak yang menangani revitalisasi pasar sudah melaksanakannya dengan baik?
3. Aspek finansial
 - a. Berasal dari manakah dana revitalisasi pasar Sukodono?
 - b. Berapa dana yang didapat pasar Sukodono dalam revitalisasi?
 - c. Apakah dana yang di dapat pasar Sukodono sudah di digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin?
 - d. Menyangkut aspek finansial, apakah para pedagang ada yang mendapatkan bantuan atau pinjaman modal usaha dari pemerintah daerah setelah adanya revitalisasi?
4. Aspek distribusi dan control kualitas barang
 - a. Setelah dilakukan revitalisasi, apakah ada pengawasan barang yang dijual di pasar dari dinas pasar atau pemerintah daerah?
 - b. Jika ada seperti apa pengawasan tersebut?
5. Aspek perbaikan sarana fisik dan infrastruktur

- a. Apa saja sarana fisik yang di benahi dalam revitalisasi di pasar Sukodono?
 - b. Apa saja sarana infrastruktur yang dibenahi dalam revitalisasi pasar Sukodono?
6. Apa saja faktor pendukung revitalisasi pasar Sukodono?
 7. Apa saja faktor penghambat revitalisasi pasar Sukodono?



Lampiran 5. Curriculum Vitae**CURRICULUM VITAE****DATA PRIBADI**

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Nama | : Choirul Anam |
| 2. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : Lumajang, 11 November 1993 |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Email | : anamtruz@gmail.com |
| 7. No. HP | : 082245452016 |

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Dawuhan Lor – Kab. Lumajang (2000-2006)
2. SMP Negeri 2 Sukodono – Kab. Lumajang (2006-2009)
3. SMA Negeri 3 – Kab. Lumajang (2009-2012)
4. Universitas Brawijaya – Malang (2012-2016)

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Praktek Kerja Lapangan/Magang
Praktek Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang
Periode : Agustus 2015-September 2015
Tujuan : Persyaratan Kelulusan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
Posisi : Bagian Formasi dan Informasi

